



Laporan Hasil Penelitian Individu

POLIGAMI **dan RELEVANSINYA** **dengan KEHARMONISAN** **RUMAH TANGGA**

Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung

H. Khoirul Abror





**POLIGAMI DAN RELEVANSINYA DENGAN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)**

LAPORAN HASIL PENELITIAN INDIVIDU

**Oleh :
H. Khoirul Abror**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
2016**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

© Hak cipta pada pengarang

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku : POLIGAMI DAN RELEVANSINYA DENGAN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi di
Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)

Penulis : H. Khoirul Abror

Cetakan : 2016

Pertama

Desain Cover : Tim

Layout oleh : Tim

Pusat Penelitian dan Penerbitan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

IAIN Raden Intan Lampung

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame

Telp. (0721) 780887 Bandar Lampung 35131

ISBN :

SUMMARY

Islam tidak membiarkan laki-laki bebas melakukan poligami dengan jumlah istri tidak terbatas dan membiarkan perbuatan-perbuatan zalim yang biasa dilakukan laki-laki. Islam membatasi jumlah istri yang bisa dinikahi sesuai dengan kemampuan maksimal laki-laki dalam melakukan tugasnya, yaitu empat istri. Itupun dengan syarat mempunyai kesanggupan untuk memberi nafkah serta bersikap adil diantara mereka. Adil disini adalah segala sesuatu yang bersifat lahiriyah seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan lain-lain. Sedangkan masalah batin, tentu saja manusia tidak dapat berbuat adil secara hakiki.

Alasan yang melatar belakangi suami melakukan poligami yaitu: keinginan pelaku dan berdasarkan rasa cinta terhadap seseorang; alasan ekonomi, mereka merasa mampu untuk menghidupi lebih dari seorang istri; hubungan gelap sang suami dengan wanita lain yang diawali dari bersenang-senang untuk melakukan hubungan badan dengan wanita lain, lalu tumbuh rasa sayang yang mendalam, sehingga bersedia untuk menikahnya (poligami) dengan cara sirri atau tidak tercatat di KUA setempat..

Faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dalam pasangan poligami di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung yaitu: Pertama; faktor yang berasal dari dalam (internal) yakni yang berasal dari dalam rumah tangga (keluarga) itu sendiri. Kedua, faktor yang berasal dari luar (eksternal) yaitu bisa berasal dari keluarga ataupun masyarakat sekitar. Dan poligami bukanlah penyebab utama ketidak harmonisan rumah tangga, tetapi juga rumah tangga yang berpoligami tidak dapat dikatakan harmonis sebagaimana harmonisnya rumah tangga monogami, kecuali hanya sebatas cukup harmonis.

Kata Kunci:

- *Latarbelakang melakukan Poligami*
- *Poligami dan Keharmonisan Rumah Tangga*



SAMBUTAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016, yang dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibiayai berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016.

Kami menyambut baik hasil Penelitian Individu yang dilaksanakan oleh saudara H. Khoirul Abror dengan judul **POLIGAMI DAN RELEVANSINYA DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)** yang dilakukan berdasarkan SK Rektor Nomor 310 TAHUN 2016 tanggal 20 Mei 2016 Tentang Penetapan Judul Penelitian, Nama Peneliti, Pada Penelitian Kelompok Dosen IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016.

Kami berharap, semoga hasil penelitian ini dapat meningkatkan mutu hasil penelitian, menambah khazanah ilmu keislaman, dan berguna serta bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan yang berbasis iman, ilmu, dan akhlak mulia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Desember 2016
Ketua Lembaga Penelitian
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat,

Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si.
NIP. 195707151987031003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	iii
SAMBUTAN KETUA LP2M IAIN RADEN INTAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tinjauan Pustaka.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	21
E. Kontribusi Penelitian.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami.....	23
1. Pengertian Poligami	23
2. Dasar Hukum Poligami.....	24
B. Dampak Perkawinan Poligami	52
C. Keharmonisan Rumah Tangga	54
1. Diseputar Rumah tangga.....	54
2. Indikator Keharmonisan Rumah Tangga	58
D. Tanggungjawab dalam Rumah Tangga	69
BAB III METODE PENELITIAN	
A. jenis Penelitian	72
B. Sifat Penelitian	73
C. Pendekatan Masalah	77
D. Sumber Data.....	78
E. Metode Pengumpulan Data	80
F. Pengolahan dan Analisis Data	81
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Penyajian Data.....	87

1. Profil Kelurahan Rajabasa	85
2. Data Poligami	96
3. Poligami dan Keharminsan Rumah Tangga	114

B. Analisis Data

A. Analisis Hukum Islam tentang Poligami.....	116
B. Latar Belakang Suami Berpoligami.....	120
C. Antara Poligami dan Keharminsan Rumah Tangga.....	127

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	135
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIO DATA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Hal ini dipertegas dalam firman Allah QS. Yāsin (36): 36

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (QS. Yāsin (36): 36)

firman Allah dalam QS. Az-Zāriyāt (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mišāqan ghalizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.² Tujuan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar- Rūm (30): 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar- Rūm (30): 21)

Mengenai pernikahan, nabi Muhammad SAW. telah menunjukan pernikahan sebagai naluri alamiah yang sewajarnya dilakukan oleh setiap orang muslim sebagai bukti kemanusiaan mereka dan kepatuhan mereka pada agamanya, bukan hanya karena adanya dorongan seksual

¹ Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1999, h.14

yang mendasarinya, walaupun hal tersebut masih dalam batas rasa kemanusiaan.

Syariat Islam dalam mengatur perkawinan ini dengan kedudukan yang demikian, merupakan suatu syariat yang sempurna, yang mencakup segala hal ihwalnya. Namun dalam kesempurnaannya itu, peraturan perkawinan menurut Islam selalu saja menjadi sasaran kritik dari mereka yang menentang peraturan perkawinan ini secara khusus, terutama mengenai segi yang menonjol yaitu bahwa Islam membolehkan poligami.³

Sebenarnya Islam tidaklah memulai poligami, tidak memerintahkan dan juga tidak menganjurkan poligami ini. Islam hanya memperbolehkan poligami dalam suasana tertentu. Menurut sejarah, poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang disebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris merupakan bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami.⁴ Jadi, tidaklah benar bahwa Islam yang mengawali adanya poligami.

Ketika Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai penutup pintu kenabian, Allah SWT mengharamkan zina dan ragam

³ Abbas Mahmud Al-Akkad, *Wanita dalam Al-Qur'an*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, h. 126.

⁴ H.S.A. Al-Hamdani, penerj. H. Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, h..39

hubungan seksual lainnya yang sejenis. Syariat Islam juga menghapuskan serta adat yang memperlakukan perempuan seperti barang dagangan, hewan dan budak. Sedangkan poligami tidak diharamkan secara mutlak.

Islam juga tidak membiarkan laki-laki bebas melakukan poligami dengan jumlah istri tidak terbatas dan membiarkan perbuatan-perbuatan zalim yang biasa dilakukan laki-laki. Islam membatasi jumlah istri yang bisa dinikahi sesuai dengan kemampuan maksimal laki-laki dalam melakukan tugasnya, yaitu empat istri. Itupun dengan syarat mempunyai kesanggupan untuk memberi nafkah serta bersikap adil diantara mereka. Adil disini adalah segala sesuatu yang bersifat lahiriyah seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan lain-lain. Sedangkan masalah batin, tentu saja manusia tidak dapat berbuat adil secara hakiki.

Dasar pokok Islam yang membolehkan poligami adalah QS. An-Nisā

(4): 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا .

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak

yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim bersama hartanya yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. Ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma’ saudara Aisyah, yaitu bagaimana asal mula orang dibolehkan beristeri lebih dari satu sampai dengan empat dengan alasan memelihara anak yatim. Lalu Aisyah menjawab: Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang berada dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dan harta si wali. Si wali tertarik kepada hartanya dan kecantikannya, maka ia ingin mengawininya dengan tidak membayar mahar yang sepantasnya. Ia tidak memberikan mahar kepada si yatim kecuali sekadarnya, maka dilaranglah yang demikian, dan disuruh untuk mengawini wanita lain yang baik sebanyak dua, tiga, atau empat.

Kebolehan menikah dengan perempuan lain walaupun sampai empat adalah untuk menghindari terjadinya aniaya dan perlakuan curang terhadap anak yatim; daripada menghadapi kesulitan dalam mengelola harta anak yatim, boleh beristeri biarpun sampai dengan empat, dengan syarat dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri itu. Tetapi jika tidak dapat berlaku adil terhadap beberapa isteri, cukuplah seorang isteri saja.

Di Indonesia kebolehan berpoligami telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keduanya merupakan sumber hukum materiil bagi hakim untuk memutus perkara di Pengadilan Agama, khususnya perkara perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah poligami diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, poligami diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.

Kendatipun demikian, kebolehan hukum berpoligami sebagai alternatif, terbatas hanya sampai empat orang isteri. Ini ditegaskan dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) menganut asas monogami. Tetapi apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan hukum serta agama membenarkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang (poligami). Namun demikian hal itu hanya dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan harus

memeriksa hal-hal yang menjadi syarat diperbolehkannya poligami apakah suami tersebut memungkinkan untuk berpoligami atau tidak.

Pada awalnya mungkin isteri dapat menerima kehadiran isteri lain dalam kehidupan rumah tangga mereka. Namun lama-kelamaan isteri akan merasakan cemburu yang nantinya akan menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini wajar karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat/watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan rumah tangga yang monogamis. Demikian menurut Rasyid Ridha yang dikutip oleh Masjfuk Zuhdi dalam bukunya *Masail Fiqhiyah*.⁵ Karena itu, poligami diperbolehkan bila memang dalam keadaan darurat dengan syarat utama dapat berbuat adil dan mendapat izin dari Pengadilan.

Berbeda dengan rumah tangga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Cet. Ke-10*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997, h. 13

keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian.⁶ Dalam masalah poligami memang terdapat kemaslahatan, baik bagi pelaku poligami sendiri, rumah tangga maupun keluarga, meskipun banyak pula ditemukan kemuḍaratan bagi pelaku poligami, rumah tangga maupun keluarganya. Oleh karena itu, poligami diperbolehkan bila memang dalam keadaan darurat dengan syarat utama dapat berbuat adil dan mendapat izin dari Pengadilan. Hal itu sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

دَرْءُ الْمَقْصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan/ bahaya (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan/ manfaat (*maṣlahah*)”.⁷

Meskipun sudah diatur sedemikian rupa oleh Undang-undang, namun realitanya tidaklah sesuai dengan peraturan. Sebagian besar poligami dilakukan tanpa mendapat izin dari pengadilan atau disebut dengan istilah poligami di bawah tangan. Beberapa kasus poligami yang ada di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung ini, dipandang laik untuk diteliti, terlebih mengenai latarbelakang para suami yang melakukan poligami, bahkan juga hubungan antara poligami dan keharmonisan rumah tangganya.

B. Rumusan Masalah

⁶ *Ibid.*,

⁷ Jalaluddin as-Suyuṭi, *al-Asybah wa an-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), h. 176.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi suami melakukan poligami di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung?
2. Bagaimana relevansinya poligami dengan keharmonisan rumah tangga bagi pelaku poligami di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung?

C. Tinjauan Pustaka

Teori merupakan salah satu bagian yang memegang peranan penting dalam suatu penelitian, karena teori yang digunakan dalam penelitian, dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang diteliti secara sistematis. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan faktor yang melatarbelakangi suami melakukan poligami dan bagaimana relevansinya poligami dengan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan poligami di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung?

Untuk mendapatkan gambaran dalam penelitian ini, ada beberapa teori yang dipandang layak ditetapkan sebagai *grand teori* yang digunakan, antara lain:

1. Teori *Maqâşid Syarî'ah*. Secara bahasa *Maqâşid Syarî'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqâşid* dan *Syarî'ah*. *Maqâşid* berarti kesengajaan atau tujuan. *Maqâşid* merupakan bentuk jama' dari *maqşûd*, yang berasal dari suku kata *Qaşada* yang berarti menghendaki atau

memaksudkan, *Maqâṣid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.⁸ Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa berarti المواضع⁹ artinya jalan menuju sumber air, dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.¹⁰ Menurut istilah, Al-Syatibi menyatakan, “Sesungguhnya *syari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia ini dan akhirat”¹¹

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa, tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam.¹² Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syatibi, yang menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif mâ lâ yustaṭi'* (membebankan sesuatu yang tidak

⁸ Ahmad Qorib, *Uṣul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet. II), h. 170.

⁹ Dikutip oleh Asafri Jaya dalam kitab *lisân al-'Arab* kepunyaan Ibnu Mansur al-Afriqi, (Bairut: Dâr al-Sadr, t.th), VIII, h. 175

¹⁰ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 140.

¹¹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqât fie Uṣûl al-Syari'ah*. (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), jilid 2, h. 374.

¹² Ibn Qayyim, *I'lam al-Muaqi'in Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl, t.t.), Jilid III h. 3; lihat juga Izzuddin Ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Bairut: Dar al-Jail, t.t), jilid II, h. 72; Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, h. 1017.

dapat dilaksanakan).¹³ Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut dalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi (*Maqâṣid al-Syarî'ah/ Maqâṣid al-Khamsah*) dimaksud adalah memelihara *agama, jiwa, akal, keturunan dan harta*.¹⁴

Dapat dipahami bahwa teori *Maqâṣid al-Syarî'ah*, dalam hukum Islam, sebagaimana disyari'atkan oleh Allah dengan tujuan utama: merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat.¹⁵ Seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan atau (*needs*).¹⁶

Al Buthi mengatakan bahwa kata *maṣlahah* sama dengan kata manfaat dari sisi *wazan* (timbangan) dan makna. Dan setiap

¹³ Al- Syatiby, *al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 150. lebih lanjut tentang tujuan hukum Islam dapat dilihat dalam *Fathi al-daraini, al-manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihadi bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadist, 1975), h. 28; Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958), h. 366; Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad; Islamic Research Institute, 1977), h. 223.

¹⁴ Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 20

¹⁵ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet.2, Penamadani, Jakarta, 2005, h. 19

¹⁶ M. Fahim Khan, *Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory*, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed), *Reading in Islamics Economic Thought*. h. 193.

apapun yang mengandung manfaat, berupa mendatangkan faedah dan kenikmatan atau berupa perlindungan seperti menjauhkan dari bahaya atau rasa sakit, semua itu pantas disebut dengan *maṣlahah* ¹⁷

Yusuf Hamid mengatakan bahwa kata *maṣlahah* mutlak kembali kepada 2 hal:

- a. Makna *hakiki*; Sebagaimana Al Buthi bahwa kata *maṣlahah* sama dengan kata manfaat (dalam bahasa arab), dari sisi *wazan* (timbangan) dan makna, ini adalah makna *hakiki*;
- b. Makna *Majāzi*; Secara *majazi*, berarti perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat, maksudnya dalam konteks *kausalitas*. Seperti halnya perniagaan yang mengandung manfaat materi dan menuntut ilmu yang mengandung manfaat maknawi.

18

Kemaslahatan inilah, dalam pandangan al-Syatibi, menjadi *Maqâṣid al-Syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan *syari'at*, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafṣilan*), didasarkan pada suatu *'illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan *kemaslahatan* hamba.¹⁹

¹⁷ Muhammad Said Romdhon Al Buthi, *Ḍawābitu al Maṣlahah fie al-Syariah al-Islamiyah*, (Muassasah Risalah), h. 23; Lihat juga, Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, (Kairo: Darul Ma'arif), h. 2479-2480

¹⁸ Lihat, Yusuf Hamid Alim, *Al Maqâṣid al 'Ammah Lie as-Syariah al-Islamiyah*, (Riyadh: Ma'had Ali Al Fikri Al Islami, Cet-2, 1994 M/1415 H) , h. 133-134

¹⁹ Muhammad 'Iz ad-Din Abdul Aziz bin Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fie Maṣalih al-Anam*, Juz 1, t.t.p.,: al-Istiqomah, t.t., h. 12, didalam kitab ini dijelaskan

Menurut *syara'*, para *Ushuliyyun* membagi *maṣlahah mursalah* (dilihat dari segi kandungannya) menjadi dua pengertian:

- a. *Maṣlahah 'Ammah*; *Maslahat* ini mengacu kepada tujuan pensyari'atan, yakni untuk *kemaslahatan* (bersifat umum), yang dimaksud disini adalah sesuatu yang membawa kenikmatan atau yang mengarah kepada kenikmatan (jiwa dan raga, duniawi dan *ukhrawi*), dalam hal ini lawan katanya adalah kerusakan (*mafsadat*);
- b. *Maṣlahat Khaṣṣah*; yakni *kemaslahatan* yang bersifat khusus (bersifat pribadi), dan ini sangat jarang sekali, seperti *kemaslahatan* bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan hilang. Menurut Kamaluddin Imam, sifat kekhususan dalam *maṣlahah* ini bergantung kepada prakteknya, hakikatnya *fasakh* nikah dalam kondisi seperti ini adalah umum diantara istri yang suaminya hilang.²⁰

Pengertian pertama ini tidak jauh berbeda dengan pengertian *maṣlahah* dari segi bahasa. Bila disimpulkan, mengandung arti sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat

pembagian *mashalah* kepada hakiki dan majazi, hakiki bermakna kelezatan/kenikmatan sementara majazi bermakna sebab-sebab adanya kenikmatan/kelezatan tersebut. Lihat pula Abd. Rahman bin Ahmad al-Iji, *Syarah al-'Adhl ala Mukhtashar al-Muntaha*, Juz 2, ttp. al-Amiriyah, tt, h. 239

²⁰ Muhammad Kamaluddin Imam, *Uṣulul Fiqh Al-Islamy*, (Iskandariyah: Darul Matnu'at Al Jami'ah, h. 201-202

karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.²¹ Meskipun diakui bahwa *Maṣlahah* atau *istiṣlah* merupakan salah satu dari tertib sumber hukum yang *kehujahannya* masih diperselisihkan oleh ulama fiqh. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah²² dan Hanafiah tidak mengakui *maṣlahah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum.²³

Menurut hukum Islam, bahwa tujuan *syari'at* Islam (*maqâṣid syari'ah*) adalah mendatangkan *maṣlahah* dan menghindarkan bahaya, karena perceraian sangat dimungkinkan menimbulkan *muḍarat* kepada suami, istri, anak, dan harta bersama (gono gini), maka perceraian, oleh pemerintah dapat dipandang sebagai masalah

²¹ Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2011, h. 325. Bandingkan, M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, h. 186

²² Moh. Mukri, dalam bukunya *Benarkah Imam Syafi'i Menolak Maslahah?* Memberikan bukti bahwa meskipun kalangan ulama yang secara teoritis menolak konsep *maṣlahah*, ternyata pemikiran fikihnya membuktikan hal yang sebaliknya, yaitu menggunakan pertimbangan-pertimbangan *maṣlahah* dalam bidang ijtihad mereka. Ulama Syafi'iyah misalnya memandang boleh membedah perut seorang ibu yang sudah meninggal dengan tujuan mengeluarkan janin yang ada di dalamnya, apabila diduga kuat bahwa janin itu akan keluar dalam keadaan hidup, meskipun menurut *syara'* terdapat larangan mengganggu mayat. Bahkan ada ulama Syafi'iyah, sebagaimana beliau mengutip pendapat Yusuf Qardawi, yang memandang wajib melakukan pembedahan mayat dalam keadaan demikian karena hal itu merupakan upaya menyelamatkan orang hidup dengan menghilangkan bagian dari mayat seseorang. Lihat Moh. Mukri, *Benarkah Imam Syafi'i Menolak Maslahah?*, Yogyakarta: Pesantren Nawaesea Press, 2010, h. 9-10

²³ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kecana, 2009, h. 150-151. Lihat pula Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 141

darurat karena tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadiś. Hukum yang diterapkan berdasarkan *ijtihad* ini dapat berubah sesuai kondisi, selama perubahan hukum itu untuk *kemaslahatan* dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadiś, atau *maqâşid al-syarî'ah* berdasarkan *kaidah fiqhiyah*:²⁴

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمَنَةِ

“Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman”²⁵.

Diantara kaidah fikih yang juga bisa dijadikan dasar adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maşlahah*)”.²⁶

Menurut Abdul Manan,²⁷ ada beberapa faktor yang menjadi alat atau faktor pengubah hukum, yaitu faktor arus *globalisasi*, faktor sosial budaya, faktor politik, faktor ekonomi, faktor iptek, pendidikan, hukum, dan supremasi hukum.

²⁴ Huzaemah Tahido Yango, *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*, Jakarta GT2 dan GG Pas, h. 22.

²⁵ Menurut Syamsul Anwar, mengemukakan bahwa ada 4 (empat) syarat hukum dapat berubah: 1) Bila ada tuntutan untuk berubah; 2) Tidak menyangkut ibadah mahdah (ibadah pokok); 3) Hukum itu tidak bersifat Qaṭ'i tapi bersifat ḥukmî; 4) ada landasan syar'inya.

²⁶ Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), h. 176.

²⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005, h. 57.

Ada pula yang menjadikan *maşlahah mursalah* sebagai landasan berpendapat. Teori ini mengajarkan bahwa: “Apa yang tidak diperintahkan secara *eksplisit* dalam Al-Qur’an dan Al Hadis dapat dibuat aturan yang mengharuskan berdasarkan *kemaslahatan* dan sekaligus menghindari *muḍarat*. Berdasarkan cara berfikir ini, pencatatan perkawinan dapat diwajibkan demi menjaga *kemaslahatan* suami, istri, dan anak-anaknya,”²⁸ karena dinilai bahwa perkawinan yang tidak tercatat lebih banyak mendatangkan *muḍarat* daripada manfaatnya.

2. Teori kebutuhan sebagaimana yang diungkap oleh Abraham Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan digambarkan sebagai sebuah *hierarki* atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan.²⁹ Kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow tersebut dapat diaplikasikan kepada lima tingkat kebutuhan:³⁰
 - a. Pemenuhan kebutuhan “*fisiologis*” antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian upah atau gaji yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman;

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya Terhadap Anak dan Harta*, Jakarta, GT2 dan GG Pas, Mei 2007, h. 38.

²⁹ Jess; Gregory J. Feist (2010). *Teori Kepribadian: Theories of Personality*. Salemba *Humanika*. h. 331.

³⁰ James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management*, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998). h. 274

- b. Pemenuhan kebutuhan “rasa aman” antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian tunjangan, keamanan kerja dan lingkungan kerja yang aman;
- c. Pemenuhan kebutuhan “rasa memiliki dan kasih sayang” antara lain dapat diaplikasikan dalam hal dorongan terhadap kerja sama, *stabilitas* kelompok dan kesempatan berinteraksi *social*;
- d. Pemenuhan kebutuhan akan “penghargaan”, dapat diaplikasikan dalam hal penghormatan terhadap jenis pekerjaan, *signifikansi aktivitas* pekerjaan dan pengakuan *public* terhadap *performance* yang baik;
- e. Pemenuhan kebutuhan “*aktualisasi diri*” antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pilihan dalam *berkreativitas* dan tantangan pekerjaan.

Maslow memberi *hipotesis* bahwa setelah *individu* memuaskan kebutuhan pada tingkat paling bawah, *individu* akan memuaskan kebutuhan pada tingkat yang berikutnya. Jika berada pada tingkat tertinggi, tetapi kebutuhan dasar tidak terpuaskan, maka *individu* dapat kembali pada tingkat kebutuhan yang sebelumnya. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama dalam suatu proses *motivasi*, seorang *individu* akan terdorong untuk berperilaku bila terdapat suatu kekurangan dalam dirinya, baik

secara *psikis*, maupun *psikologis*. *Motivasi* itu sendiri meliputi usaha, ketekunan dan tujuan.³¹

Bila ditelaah lebih dalam, berbagai tingkat kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow di atas, sepenuhnya telah terakomodasi dalam konsep *maqâsid al-syarî'ah*. Bahkan, konsep yang telah dikemukakan oleh Al-Syatibi mempunyai keunggulan *komparatif* yang sangat *signifikan*, yakni menempatkan agama sebagai faktor utama dalam *elemen* kebutuhan dasar manusia; satu hal yang luput dari perhatian Maslow, seperti yang telah dimaklumi bersama, agama merupakan *fitrah* manusia dan menjadi faktor penentu dalam mengarahkan kehidupan umat manusia di dunia ini.

Dalam *perspektif* Islam, berpijak pada *doktrin* keagamaan yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh *kemaslahatan* di dunia dan di akhirat merupakan bagian dari kewajiban agama, manusia akan *termotivasi* untuk selalu *berkreasi* dan bekerja keras. Hal ini, pada akhirnya, tentu akan meningkatkan *produktivitas* kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan..

3. Teori Kebijakan Penegakan Hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief³² Bahwa nilai kepercayaan merupakan salah satu nilai atau kepentingan masyarakat yang perlu selalu dipelihara,

³¹ James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management*, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998). h. 268

³² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, bandung, 1998, h. 6

ditegakkan dan dilindungi. Masyarakat yang aman, tertib dan damai diharapkan dapat dicapai apabila ada “saling kepercayaan” dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai kepercayaan inilah yang justeru menjalin hubungan harmonis kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya akan timbul kekacauan, ketidaktenteraman dan ketidakdamaian apabila nilai kepercayaan telah hilang, atau mengalami *erosi* dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah tentu ada maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, mengungkap dan menganalisis serta menemukan: bagaimana relevansinya poligami dengan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan poligami.
- b. Untuk mengetahui, menemukan, menjelaskan, dan menganalisis serta merumuskan faktor apa sajakah yang melatarbelakangi suami melakukan poligami di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung.

E. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai kontribusi untuk:

1. Menambah khazanah ilmiah dibidang hukum, baik yang berkaitan dengan hukum *meteriel* maupun hukum *formil*, lebih khusus lagi dalam bidang hukum Islam; terutama yang terkait erat dengan

hukum perkawinan, terutama bagi pasangan suami isteri yang berpoligami;

2. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bermanfaat serta menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi pembuat dan penegak hukum yang menjalankan undang-undang, serta para pihak yang berkait erat dengan petugas pencatat nikah (PPN), terutama bagi calon pasangan suami isteri berpoligami yang berkehendak untuk menjalankan bahtera rumah tangga.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan gabungan dari *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.³³ Sedangkan dalam bahasa Arab, poligami sering diistilahkan dengan *ta'addud az-zaujat*.³⁴ Poligami menurut kamus bahasa Indonesia ialah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.³⁵

Menurut tinjauan antropologi sosial, poligami mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita dalam

³³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi di Islam*, (Jakarta:PT. Baru Van Hoeve,t,t, 2006), h. 789

³⁴ Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1985), h. 970

³⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1089

waktu bersamaan, sedangkan poliandri adalah perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa orang laki-laki.

Istilah poligami jarang dipakai dikalangan masyarakat, dan hanya digunakan dikalangan antropologi saja, sehingga secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yang disebut poligami, dan kata ini digunakan sebagai lawan dari poliandri.³⁶ Sehingga secara istilah, poligami berarti ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas terdapat kalimat “salah satu pihak”, akan tetapi karena istilah perempuan yang memiliki banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud poligami disini adalah ikatan perkawinan, dimana seorang suami punya beberapa isteri dalam waktu bersamaan.³⁷

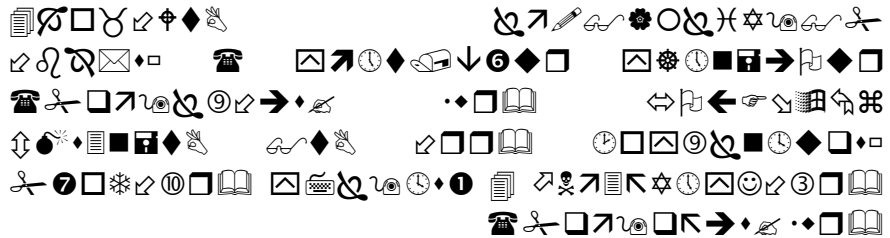
2. Dasar Hukum Poligami

Ayat al-qur'an yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami adalah QS.an-Nisā (4): 3 sebagai berikut:



³⁶ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, h. 71-72

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Op Cit*, h. 1185



"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil³⁸, Maka (kawinilah) seorang saja³⁹, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (QS.an-Nisâ (4): 3).⁴⁰

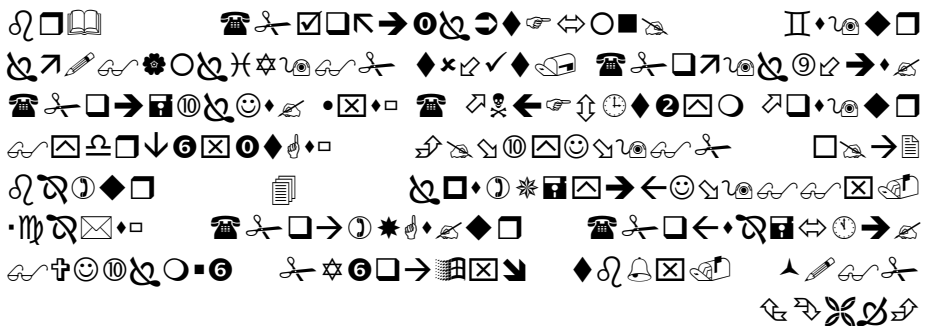
Menurut Hamka untuk memahami persoalan kebolehan melakukan perkawinan lebih dari seorang isteri (poligami), harus dilihat *munasabah*nya dengan ayat sebelumnya, yakni QS. An-Nisa (4): 2, penegasan tentang diperbolehkannya beristeri lebih dari seorang sampai empat, sebagaimana termaktub dalam ayat (3), ..."maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat...". Dengan demikian pangkal ayat dua tentang pemeliharaan anak yatim bertemu dengan kebolehan untuk beristeri lebih dari satu sampai empat.

³⁸ Dimaksud dengan berlaku adil disini adalah: perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

³⁹ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu; sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s..a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

⁴⁰ Departemen Agama RI , Dirjen Bimas Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (PT. Tehazed, Jakarta,, 2010), h. 99

Selanjutnya, dalam persoalan keharusan berbuat adil terhadap perempuan yang dinikahi sebagai syarat kebolehan melakukan perkawinan lebih dari seorang sampai empat, sebagaimana ditegaskan pada kalimat selanjutnya masih dalam surat an-Nisa ayat (3) yang berbunyi “tetapi bila kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka satu saja..”. sebagai ganti adanya kekhawatiran tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (yang dinikahi). Kekhawatiran ini didasarkan atas firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) : 129:



“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung; dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa (4):129)⁴¹

Menurut Sayid Sabiq, seorang suami yang mau berpoligami harus meyakini bahwa dia dapat berlaku adil. Adil yang dimaksud

⁴¹*Ibid*, h. 130

adalah kemampuan untuk berbuat adil secara lahir yaitu mampu membagi waktu dan hartanya antara isteri muda dan isteri tuanya, dan selain adil secara lahir juga mampu berlaku adil secara batin yaitu cinta dan kasih sayang.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan atau hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, suami dapat beristeri lebih dari seorang (poligami). Sedangkan yang menjadi dasar pelaksanaan poligami di Indoneesia yang berdasarkan kepada UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 yang berbunyi:

- a. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami;
- b. Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁴²

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 40, yaitu: “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.⁴³

⁴² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), h. 298

⁴³ K. Kwantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indah, 1980), h. 82

Sebagai bahan pemikiran, bahwa dikemukakan oleh Al-Maragi yang disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Maragi, bahwa kebolehan poligami yang disebutkan dalam Surat an-Nisa ayat 3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan dengan syarat dapat dipercaya menegakan keadilan dan aman dari perbuatan yang melewati batas. Untuk itu merupakan suatu kewajiban bagi para hakim dan pemberi fatwa yang telah mengetahui, bahwa menolak kerusakan harus lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan. Seperti disebutkan dalam kaidah fiqh:

دَرَاءُ الْمُفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِهِ⁴⁴

“Menghindari kerusakan, mendatangkan kemaslahatan”

Dan juga tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ⁴⁵

Maksud dari kaidah tersebut bahwa kemadaratan itu telah terjadi dan akan terjadi. Apabila demikian halnya wajib untuk

⁴⁴ Ima Jalaludin Abdurrahman Abi Bakar As Suyuti, *Al Misbah Wa An-Nazair*, (Beirut: Dar Al Fakir, 1995 M./1415H.), h. 63

⁴⁵ *Ibid*, h. 63

dihilangkan.sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al- Baqarah (2): 11:



“Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan."

Hendaknya mereka mempertimbangkan atau memikirkan baik-baik dalam menanggulangi kasus-kasus seperti itu, hal ini menunjukkan betapa pentingnya hati-hati dalam melakukan poligami. Hubungannya dengan QS An-Nisa (4): 129, menurut Al-Maragi yang terpenting adalah usaha maksimal untuk berbuat adil, ataupun diluar kemampuan manusia seperti kecenderungan hati manusia terhadap seorang isteri tidak terhadap ister-isterinya yang lain, maka dalam hal ini seorang tidak diwajibkan berbuat adil.⁴⁶

Sedangkan kondisi-kondisi diperbolehkannya poligami menurut Al-Maragi adalah:

1. Bila seorang suami beristerikan seorang wanita mandul sedangkan ia sangat mengharapkan anak;
2. Bila isteri telah tua dan mencapai umur *ya'isah* (tidak haid) lagi, dan ia mampu memberi nafkah kepada lebih dari seorang isteri;

⁴⁶ Al-maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Jilid Pertama (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1382/1963), h. 181

3. Demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami.
4. Bila diketahui dari hasil sensus, kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dengan perbandingan yang mencolok.⁴⁷

Mengenai perkawinan poligami ini semua Imam Mazhab (Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristeri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh lima.⁴⁸ Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Abu Daud dari Harits bin Qais, ia berkata:

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

“Saya masuk Islam bersama-sama isteri dengan delapan isteri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada nabi SAW. Maka beliau bersabda: pilihlah empat orang diantara mereka”⁴⁹

Adapun hadis yang mengisyaratkan diperbolehkannya poligami diantaranya, dari Malik meriwayatkan dalam Al-Muwattha', Nasa'iy dan Daruquthni dalam masing-masing kitab Sunnahnya, mengungkapkan:

⁴⁷ *Ibid*, h. 182

⁴⁸ Muhammad Jawad Mughiniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerjemah Masykur AB, Lentera 1996,) h. 333

⁴⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh As- Sunnah*, Penerjemah Syaiful Islam, (Bandung: Al-Maarif, 1999), h. 139

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَيْلَانِ بْنِ أُمَيَّةِ التَّقَفِيِّ وَ قَدْ
أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ : إِخْتَرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَ هُنَّ

“Bahwa Nabi berkata kepada Ghailan bin Umayyah Attsaqafi yang masuk Islam, padahal ia mempunyai sepuluh orang isteri. Rasullullah bersabda kepadanya: pilihlah empat orang diantara mereka, dan ceraikan yang lainnya.⁵⁰

3. Pendapat Para Ulama Tentang Poligami

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudarat dari pada manfaatnya; karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing.

Hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati,

⁵⁰*Ibid*, h. 139

dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalkan isterinya mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.⁵¹

Pendapat yang lebih ekstrim datang dari Muhammad Abduh, yang mengatakan bahwa hukum berpoligami bagi orang yang merasa khawatir tidak akan berlaku adil adalah haram. Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan membagi kasih sayangnya secara adil kepada masing-masing isterinya.

Mengenai syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para Imam Madzhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki seorang isteri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang isteri; Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara

⁵¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), h. 12.

perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.⁵² dalam hal ini imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan isteri. Ayat *zâlika adnâ anlâ taulû* dipahami oleh imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata '*alâ ya'ulû*' yang berarti menanggung dan membelanjai. "kalau satu istri saja sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu istri".⁵³

Para ulama juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristeri satu saja itu jauh lebih baik. Para ulama Ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai isteri lebih dari empat, maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang isteri yang empat itu dan telah habis pula masa iddahnyanya. Dalam masalah membatasi isteri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sebagai penjelasan dari firman Allah SWT, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan.

Menurut Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami

⁵² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), h. 89.

⁵³ *Ibid*, h. 90

perlu untuk memahami konteks QS. An-Nisa' (4): 3. Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat An-Nisa' (4): 1-3 pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan "Dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim..". Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa maskawin; maka Al-Qur'an memperbaiki perilaku yang salah tersebut. Bahwa menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya.⁵⁴

Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Syahrur. Ia memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama: bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim,

⁵⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terjemaha Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, (Yogyakarta: LSPPA dan CUSO, 1994), h. 89.

kedua: harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.⁵⁵

Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu perbuatan *Rukhsah*. Karena merupakan *rukshah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil kepada isteri-isterinya. Keadilan yang dituntut disini termasuk dalam nafkah, muamalah, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap isterinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat isteri.

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat 3 pada surat An-Nisa poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Keadilan yang dipersyaratkan pada ayat di atas adalah keadilan dalam berbagai hal yaitu:

- a. Adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka selain makan, minum, serta pakaian dan sebagainya.
- b. Pakaian, rumah atau tempat tinggal sebab orang hidup tidak cukup hanya makan dan minum saja tanpa tempat tinggal dan pakaian untuk menutup aurat.

⁵⁵ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terjemah Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: Elsaq, 2004), h. 428

- c. Waktu dalam menggilir isteri-isteri, masing-masing beberapa lama, jika yang satu mendapatkan giliran satu malam maka suami juga harus menggilir isteri lainnya juga satu malam.
- d. Waktu bepergian bersama isteri juga harus mendapat keadilan, untuk itu diperlukan undian bagi suami yang mempunyai lebih dari satu isteri saat ia menghendaki bepergian.⁵⁶

Poligami terikat oleh syarat berlaku adil kepada seluruh isteri, dan barang siapa yang tidak bisa memastikan kesanggupannya untuk merealisasikan prinsip keadilan kepada seluruh isteri-isterinya, maka dia tidak boleh beristeri lebih dari satu; Seandainya dia tetap menikah lebih dari satu sementara dia tahu bahwa dia tidak dapat berlaku adil, maka nikahnya sah tapi dia berdosa.⁵⁷

Bagi orang yang memiliki isteri lebih dari satu, hendaklah memisahkan tempat kediaman masing-masing isteri itu. Masing-masing isteri menempati sebuah rumah, rumah itu pun harus sama, kecuali mereka sama-sama rela dan ikhlas ditempatkan dalam sebuah rumah saja. Apabila seorang suami tinggal didalam sebuah rumah yang terpisah dari isterinya, hendaklah pertemuan suami dengan isteri-isteri itu pun dilakukan dengan seadil-adilnya.⁵⁸

Mayoritas ulama fiqh menyadri bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman

⁵⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1995), h. 618

⁵⁷ Muhammad Asy Syaarif, *Poligami itu Wajib?*, (Yogyakarta: Mumtaz, 2012), h. 35.

⁵⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 392

Al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai suami, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang isterinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang diluar batas kontrol manusia.⁵⁹ Sedangkan kondisi-kondisi diperbolehkannya poligami menurut al-Maragi adalah:

- a. Bila seorang suami beristerikan seorang wanita mandul sedangkan ia sangat mengharapkan anak;
- b. Bila isteri telah tua dan mencapai umur *ya'isah* (tidak haid) lagi, dan mampu ia memberi nafkah kepada lebih dari seorang isteri;
- c. Demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami;
- d. Bila diketahui dari hasil sensus, kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dengan perbandingan yang mencolok.⁶⁰

Mengenai perkawinan poligami ini semua Imam Mazhab (imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristeri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh lima.⁶¹

⁵⁹Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al- 'Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyyah, 1969), h. 239.

⁶⁰*Ibid*, h. 182

⁶¹ Muhammad Jawad Mughiniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerjemah Masykur AB, Lentera 1996,) h. 333

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan, meskipun menggunakan dasar yang berbeda, para ulama konvensional mengakui poligami boleh hukumnya, bukan dianjurkan (sunnah), apalagi perintah (wajib) seperti diasumsikan kebanyakan orang. Demikian juga dari penjelasan tersebut di atas tidak ada indikasi menyebutkan poligami sebagai asas perkawinan dalam Islam, apalagi menyebutkan poligami sebagai fitrah sebagaimana dikelaim sebagian orang. Kesimpulan lain yang dapat dicatat adalah bahwa ada sejumlah nash yang dicatat para ulama mazhab, yakni: QS.an-Nisa (4): 3, an-Nisa (4): 129, al-Ahzab (33): 50, al-Mu'minin (23): 5-6, ancaman bagi suami yang tidak adil kepada isteri-isterinya, dan kasus laki-laki yang masuk Islam dan disuruh nabi mempertahankan isterinya maksimal empat. Dengan kata lain, sejumlah nash inilah yang membahas poligami. Sebagai tambahan, semua ulama tersebut di atas mencatat QS. An-Nisa (4): 3 untuk mendukung kebolehan poligami maksimal empat.⁶²

4. Kriteria-Kriteria Poligami

Kriteria ataupun alasan yang mendukung seorang suami melakukan poligami seperti halnya seorang isteri tidak dapat memberikan keturunan, atau isteri tersebut berpenyakit sehingga

⁶² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2009), h. 265

tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶³

Suatu perkawinan harus ditopang dengan pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, dikarenakan isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga ia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Faktor-faktor di atas yang menjadi sebab dibolehkannya poligami tetapi ia harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'at Islam dan undang-undang perkawinan.

Didalam surat An-Nisa tentang poligami, diturunkan setelah perang *Uhud*, pada saat itu banyak sekali pejuang muslim yang gugur, sehingga mengakibatkan banyak anak yatim yang mesti mendapatkan pengawasan dari orang tua yang bertanggung jawab. Perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut. Dalam hal ini al-qur'an telah memberikan ketentuan yang amat jelas, sehingga anak-anak yatim memperoleh hak-haknya kembali dan

298 ⁶³ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), h.

ketidakadilan tidak berlaku lagi. Islam telah memberikan yang sempurna dalam memecahkan problem yang pelik itu.⁶⁴

Berdasarkan latar belakang historis tentang turunnya ayat itu, Islam tidaklah berarti menyuruh pemeluknya untuk berpoligami, bahkan Islam datang memperketat kebolehan poligami, bukan saja dengan jumlah maksimal empat orang isteri, namun juga menjadikannya sebagai sarana untuk mengatasi persoalan anak yatim. untuk memelihara mereka dari perbuatan yang tidak diinginkan; Allah SWT membolehkan untuk menikahi mereka. Tetapi jika merasa takut akan menelantarkan mereka dan tidak sanggup memelihara anak yatim tersebut, maka Allah membolehkan mencari perempuan lain untuk dinikahi. Kebolehan poligami setidaknya harus memenuhi dua persyaratan, yaitu berlaku adil antara isteri-isteri dan anak-anaknya sesuai dengan QS An-Nisa (4): 3, dan kesanggupan membayar nafkah atau belanja nikah rumah tangganya.

Tujuan poligami dalam Islam dapat dilihat dari poligaminya Rasulullah SAW, perbuatan Nabi untuk menikahi isteri-isterinya bukan bertujuan biologis melainkan untuk membantu berbagai kesulitan yang dialami perempuan yang kemudian menjadi isteri-isterinya. Sekiranya Rasulullah seorang yang tamak terhadap perempuan, maka beliau tentu tidak menikahi perempuan-perempuan yang kebanyakan sudah janda

⁶⁴ Labib Ustadz, MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*, (Jakarta: Darul Falah, 2005) h.51

dan secara ekonomi tidak menguntungkan.⁶⁵ selama hidupnya Nabi tidak pernah menikah dengan seorang gadis kecuali Aisyah. Semua isteri Nabi selain Aisyah adalah janda yang sebagian membawa beberapa anak yatim, dan beliau baru berpoligami setelah isteri pertamanya Khadijah wafat dalam usia 60 tahun.⁶⁶ Hal ini menimbulkan akibat hukum dalam perkawinan sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan yang benar dan sah untuk mendapatkan keturunan, tidak dapat diragukan lagi perkawinan yang didasarkan atas prinsip-prinsip cinta, kehormatan, dan kepedulian timbul baik jauh lebih luhur daripada hubungan-hubungan temporer dengan berbagai pasangannya.

Perkawinan dapat dianggap sebagai keberadaan bersama dalam pasangan dimana pihak-pihak utama diberi peran yang berbeda namun saling melengkapi, yang terdiri dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana juga seorang yang melakukan perkawinan poligami akan berakibat hukum terhadap ister-isteri, harta benda dan anak-anaknya.

Setiap perkawinan memiliki bobot yang sama dalam hukum Islam dan karena itu suami tidak diperbolehkan secara terbuka sesuatu yang lebih besar pada seorang isterinya dan mengorbankan isteri-isterinya yang lain. Suami harus dapat berlaku adil dalam memberikan tanggung jawab memberikan perlindungan dan dukungan terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, karena Allah SWT telah memberikan

⁶⁵ M. Alfatih Suryadilaga, *Sejarah Poligami dalam Islam cet.1*, (Bandung: Citra Umbara 2002), h.11

⁶⁶ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h.110

kemampuan fisik dan mental yang berguna untuk melindungi peranannya sebagai pelindung dan penjaga keluarganya, kewajiban-kewajibannya adalah memberikan nafkah baik nafkah lahir seperti memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya hidup sehari-hari dan lain-lainnya maupun nafkah batin. firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah (2): 233 yang artinya:

“para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma’ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut..⁶⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap isteri-isteri yang berupa jaminan keadilan dalam memberikan nafkah sehari-hari, tempat kediaman dan kebutuhan lainnya. Mengenai alasan-alasan seorang suami diperbolehkan poligami sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

⁶⁷Departemen Agama RI, *loc cit.* h. 47

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶⁸

5. Alasan Isteri Melarang Suami Berpoligami

Pada dasarnya seorang suami yang melakukan poligami didalam Islam diperbolehkan, namun banyak juga yang memberi syarat yang sangat ketat kepada seorang suami yang ingin berpoligami, karna didalam keseharian banyak yang menyalah artikan sebuah poligami, ada yang berpoligami dengan dasar ingin dikatakan hebat oleh masyarakat ada juga yang mengatas namakan mengikuti ajaran Rasul, padahal pada kenyataannya Rasul melakukan poligami karna ingin membantu wanita-wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya di dalam medan perang.

Hikmah diizinkan nya berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri mandul.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang isteri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 57 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Umbara, 2012), h.

3. Untuk menyelamatkan suami dari *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.⁶⁹
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.

Tentang hikmah diizinkan Nabi Muhammad beristeri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya (yang merupakan *khushushiyat* bagi Nabi) adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Isteri Nabi sebanyak 9 orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah keawanitaannya atau kerumah tanggaaan.
2. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri Al-Harits (kepala suku Bani Musthaliq). Demikian pula perkawinan Nabi dengan Shafiyah (seorang tokoh dari Bani Quraizhah dan Bani Nazir).
3. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang

⁶⁹ . Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Op. Cit, h. 136

telah lanjut usianya, seperti Saudah binti Zum'ah (suaminya meninggal setelah kembali dari hijrah Abessinia), Hafshah binti Umar (suaminya gugur di perang Badar).⁷⁰

Poligami dalam Islam sangat berbeda dengan praktik poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada dua hal. **Pertama**, pada bilangan isteri dari yang tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, sebab laki-laki pada masa itu sudah terbiasa dengan banyak isteri, lalu mereka disuruh memilih empat orang saja dan menceraikan selebihnya. **Kedua**, ada syarat poligami, yaitu harus berlaku adil. Sebelumnya poligami itu tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat dengan keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsu.⁷¹

Apabila seorang isteri atau isteri-isteri yang menolak atau tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi

⁷⁰ . *Ibid*, h. 136-137

⁷¹ . Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 44-48

pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian pengadilan dan hakim pengadilan.⁷²

Apabila isteri tidak mau memberikan persetujuan pada suaminya untuk beristeri lebih dari seorang, berdasarkan salah satu alasan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini, isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁷³ Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal-pasal di atas

⁷² . Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 48-49

⁷³ Tihami, Sobari Sahrani , *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 370

dikenakan sanksi pidana; persoalan ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975:

1. Kecauali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6,7,8,9,10, ayat (1),11,12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan yang dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta kasih dan kasih sayang yang di ridā'i oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

Status hukum poligami adalah Mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif beristeri hanya sebatas 4 (empat) orang isteri. Hal itu ditegaskan oleh pasal 55 KHI sebagai berikut:

1. Beristeri lebih dari seorang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Dasar pertimbangan KHI adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang isteri. Mereka bersama-sama masuk Islam. Maka nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja diantaranya dan menceraikan yang lainnya.⁷⁴

Pada dasarnya tidak ada di dunia ini suatu perbuatan yang semata-mata mendatangkan maslahat sebagaimana juga tidak ada perbuatan yang semata-mata mendatangkan mudarat.

Terkait dengan praktik poligami di tengah-tengah masyarakat, secara jujur jika kita amati, tidak sedikit yang berhasil dalam arti tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dapat berhasil dicapai. Namun demikian, dengan mudah juga kita jumpai pernikahan poligami yang justru memporak-porandakan ketenangan rumah tangga

⁷⁴ . Zainuddin Ali, *Hukum Prdata Islam di Indonesia*, Op. Cit, h. 49-50

sebelumnya akibat satu hal dan lain hal., misalnya karena faktor ekonomi, psikologis, sifat yang tidak adil dan sebagainya.

B. Dampak Perkawinan Poligami

Dampak negatif yang ditimbulkan dari berpoligami terutama bagi isteri (pertama) dan anak-anaknya dapat disebutkan sebagai berikut diantaranya:

1. Dampak Psikologis

Perasaan inferior isteri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suaminya berpoligami akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya dan juga ketidakmampuan membahagiakan suaminya.

2. Dampak Ekonomi Rumah Tangga

Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami yang dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, tetapi dalam praktiknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan isteri muda dan menelantarkan isteri dan anak-anaknya yang terdahulu. Akibatnya isteri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.

3. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Hal ini umumnya terjadi pada rumah tangga

poligami, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami.

4. Dampak Hukum

Seringnya terjadi nikah dibawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan pda kantor catatan sipil atau kantor urusan agama), sehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh Negara. Walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. pihak perempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu perkawinan yang tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.

5. Dampak Kesehatan

Kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami atau isteri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS.⁷⁵

Menurut Al-Athar dalam bukunya *Ta'addud Az-Zaujat* sebagaimana dikutip oleh Khairuddin Nasution dalam bukunya *Riba dan Poligami: sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh*, menjelaskan empat dampak negatif dari poligami yakni:

- a. Menimbulkan kecemburuan antar isteri.
- b. Menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan dikalangan isteri jika suami tak dapat berlaku adil.

⁷⁵ . <http://yotnoali.blogspot.com/2011/07/Poligami.html>.? m=1,9/6/2014, 10:38 WIB Menimbang -Manfaat-Mudharat -

- c. Anak-anak yang lahir dari ibu yang berbeda sangat rawan terjadi permusuhan atau persaingan yang tidak sehat.
- d. Kekacauan dalam bidang ekonomi.⁷⁶

C. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, yang berarti perihal (keadaan) harmonis; keselarasan dan keserasian. rumah tangga yaitu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah); berkenaan dengan keluarga. Sedangkan keluarga adalah ibu dan bapak serta anak-anaknya.⁷⁷ Ada yang mengatakan rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat.⁷⁸ Jadi, keharmonisan rumah tangga yang didalamnya terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, bapak beserta anak-anaknya.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, dalam pelaksanaannya tidak semudah mengatakannya. Banyak ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah mengenai rumah tangga yang

⁷⁶ . *Ibid*

⁷⁷ Depdikbud; *Loc.Cit*

⁷⁸ NJ. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jamunu, Jakarta, 1969), h. 17

sebenarnya ditujukan untuk mewujudkan keharmonisan hidup suami istri berikut anggota keluarganya. Berkaitan dengan terwujudnya keharmonisan rumah tangga, Islam memberikan ketentuan peraturan hidup bermasyarakat dengan mensyariatkan pernikahan yang mengatur hubungan individu dengan individu lain yang berlainan jenis kelamin. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur pergaulan manusia, baik sebelum memasuki masa pernikahannya, saat berlangsungnya pernikahan, maupun setelah terwujudnya pernikahan.

a. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Memasuki Jenjang Perkawinan

1) Penentuan calon atas dasar agama

Dalam kenyataan hidup sehari-hari, sering dijumpai bahwa pengambilan keputusan untuk menikah dimotivasi oleh faktor lain diluar agama, misalnya menikahi seseorang karena faktor kekayaan, keturunan dan kecantikan/ketampanan. Ketiga faktor tersebut tidak dapat diingkari sebagai sesuatu yang penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tetapi mengabaikan samasekali faktor terpenting merupakan sebuah kekeliruan. Karena agamalah yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan calon pasangan hidup.

2) Pemilihan calon atas dasar keturunan

Diantara kaidah yang diletakkan Islam untuk mendukung keharmonisan rumah tangga yang akan dibangun adalah memilih pasangan hidup dari keluarga yang telah dikenal kesalehannya, akhlaknya, dan kemuliaan keturunannya.

3) Bukan keluarga atau kerabat dekat

Diantara pengarahannya Islam dalam memilih istri atau suami adalah mengutamakan orang “asing” dari pada calon yang memiliki hubungan nasab atau famili yang masih terlalu dekat. Hal ini penting demi menjaga kecerdasan anak, menjamin keselamatan jasmaninya dari penyakit menurun, cacat karena faktor keturunan, memperluas tali silaturahmi dan mempererat jalinan sosial.

4) Mengutamakan wanita yang subur

Islam menganjurkan seseorang yang akan menikah untuk memilih calon istri yang subur. Sehingga memungkinkan untuk cepat memperoleh keturunan. Karena diantara tujuan pernikahan yaitu memperoleh keturunan yang sah. Wanita yang subur antara lain dapat dikenali dari dua hal, yaitu: pertama, kebersihan jasmani dari berbagai penyakit yang dapat menghalanginya untuk memperoleh keturunan. Hal ini dapat diketahui melalui konsultasi dengan dokter ahli. Kedua, dengan memperhatikan secara cermat ibu dan saudara-saudara perempuannya yang telah menikah. Jika

mereka tergolong wanita yang subur biasanya dia juga demikian.

5) Melihat calon pasangan

b. Kewajiban dan Hak Suami Istri

c. Bersikap Realistis dalam Menyikapi Keadaan

1) Realistis dalam soal mahar dan pernikahan

Tidak baik jika pihak calon istri mengajukan tuntutan mahar yang berlebihan dan penyelenggaraan resepsi perkawinan serta pemberian hadiah diluar kesanggupan calon suami. Semua itu harus melihat kemampuan pihak calon suami dapat memenuhi atau tidak.

2) Realistis dalam pemberian nafkah

Sikap paling baik yang harus dimiliki seorang wanita adalah memperhatikan kadar kemampuan dan kekuatannya dalam memberikan nafkah. Tidak selayaknya seorang istri menuntut nafkah berlebihan manakala suaminya dalam keadaan sulit. Dan juga tidak patut bersikap rakus ketika nafkah dari suami dalam keadaan lapang. Setiap keadaan harus disesuaikan dengan kelayakan.

3) Realistis dalam menghadapi sifat masing-masing pasangan

Setiap pasangan harus siap menerima kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri pasangan.

4) Bersikap realistis dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban

Masing-masing pasangan harus berbuat menurut kadar kemampuan dirinya dan memahami kemampuan pasangan. Apabila salah satu pihak banyak menuntut untuk melaksanakan kewajiban maka pertengkaran sulit untuk dihindari. Yang satu bersikeras dengan tuntutan, sedangkan yang lain terpojok karena ketidakmampuannya.

2. Indikator Keharmonisan Rumah Tangga

Menurut Dadang Hawari mengemukakan bahwa ada enam aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan itu bahagia, yaitu:

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam rumah tangga;
Keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika.
- b. Mempunyai waktu untuk bersama keluarga;
Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya.
- c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga;
Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya

komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya konflik.

- d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga;
- e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim;
- f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga; hubungan yang erat antara anggota keluarga dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.⁷⁹

Aisjah Dachlan mengemukakan bahwa untuk mencapai kebahagiaan keluarga terdapat 10 aspek, yaitu:

- a. Hubungan antar-inter keluarga; maksudnya adalah hubungan baik dan harmonis antara satu keluarga dengan para anggota keluarga lainnya atau dengan anggota masyarakat;
- b. Membimbing anak atau mendidik anak;
- c. Pakaian;
- d. Makanan;
- e. Kesehatan;
- f. Perumahan;
- g. Keuangan;
- h. Tata laksana rumah tangga;
- i. Keamanan lahir batin;
- j. Perencanaan sehat (matang), artinya mengatur dan membuat rencana hidup keluarga dengan mempertimbangkan kemauan, kesanggupan dan kemampuan masing-masing anggota keluarga.⁸⁰

⁷⁹ <http://teori-psikologi.blogspot/2008/05/keharmonisan-rumah-tangga.html>, diakses pada sabtu, 30 Juli 2011 ; Lihat, Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, (Edisi 24, Juli 1994), h. 26

⁸⁰ NJ. Aisjah Dachlan, *Loc.Cit.*

Keluarga dikatakan harmonis atau keluarga bahagia menurut Sarlito Wirawan yang apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut:

- a. Faktor kesejahteraan jiwa. Yaitu redahnya frekwensi pertengkaran dan percekocan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
- b. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
- c. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya; Banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan.

81

Ciri-ciri keluarga harmonis menurut Islam adalah:

- a. Pembentukan keluarga yang di dasari harapan keridhaan Allah tanpa yang lain. Kedua belah pihak saling melengkapi dan

⁸¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 79)

menyempurnakan, memenuhi panggilan fitrah dan sunnah, menjalin persahabatan dan kasih sayang, serta meraih ketentraman dan ketenangan jasmani. Dalam menentukan standar jodoh keduanya hanya bertolak pada keimanan dan ketaqwan.

- b. Tujuan pembentukan keluarga. Keharmonisan rumah tangga akan terwujud apabila kedua pasangan saling konsisten terhadap perjanjian yang mereka tetapkan bersama. Tujuan utama mereka adalah menuju jalan yang telah digariskan Allah dan mengharap ridha-Nya. Dalam segala tindakan mereka yang tertuju hanyalah Allah semata.
- c. Lingkungan. Dalam keluarga yang harmonis upaya yang selalu dipelihara adalah suasana yang penuh kasih sayang dan masing-masing anggotanya menjalankan peran secara sempurna. Lingkungan keluarga merupakan tempat untuk berteduh dan berlindung, tempat dimana perkembangan dan susah-senang dilalui bersama.
- d. Hubungan antara kedua pasangan. Dalam hubungan rumah tangga yang harmonis dan seimbang suami istri berupaya saling melengkapi dan menyempurnakan. Mereka menyatu dan ikut merasakan apa yang dirasakan anggota keluarga yang lain. Mereka saling mengobati, saling membahagiakan dan menyatukan langkah dan tujuan, keduanya menyiapkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.

- e. Hubungan dengan anak. Keluarga harmonis menganggap anak sebagai bagian darinya mereka membangun hubungan atas dasar penghormatan, penjagaan hak, pendidikan, bimbingan yang layak, pemurnian kasih sayang serta pengawasan akhlak dan perilaku anak.
- f. Duduk bersama. Keluarga harmonis selalu siap duduk bersama dan berbincang dengan para anggota keluarganya, mereka berupaya saling memahami dan menciptakan hubungan mesra. Islam mengajarkan agar yang tua menyayangi dan membimbing yang muda, dan yang muda menghormati dan mematuhi nasehat yang tua.
- g. Kerjasama saling membantu. Dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis setiap anggota rumah tangga memiliki tugas tertentu. mereka bersatu untuk memikul beban bersama. Dalam bangunan ini tampak jelas persahabatan, saling tolong-menolong, kejujuran, saling mendukung dalam kebaikan, saling menjaga sisi jasmani dan rohani masing-masing.
- h. Upaya untuk kepentingan bersama. Dalam kehidupan keluarga yang harmonis mereka berusaha saling membahagiakan. Mereka saling berupaya untuk memenuhi keinginan dan memperhatikan selera pasangannya. Saling menjaga dan memperhatikan cara berhias dan berpakaian. Untuk kepentingan bersama mereka selalu bermusyawarah dan berkomunikasi untuk meminta pendapat, pada

waktu anak telah mampu memahami masalah tersebut ia di ikutkan dalam musyawarah tadi.⁸²

3. Faktor yang Mempengaruhi Ketidak Harmonisan Rumah Tangga

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor kekerasan dan penganiayaan
- c. Faktor tidak ada kejujuran dan cemburu
- d. Faktor perselingkuhan
- e. Faktor judi dan minuman keras
- f. Faktor istri tidak patuh pada suami dan tidak akur dengan mertua
- g. Faktor suami atau istri pergi tanpa pamit
- h. Poligami tidak sehat.⁸³

Keadaan krisis rumah tangga tersebut adakalanya disebabkan oleh satu faktor, dua faktor bahkan tiga faktor sekaligus yang mengakibatkan tidak ada keharmonisan dalam pergaulan hidup suami istri dan tidak menutup kemungkinan faktor-faktor tersebut muncul didorong oleh pengaruh lain seperti pengaruh lingkungan,

⁸² <http://2. Blogspot.com, Novita BossFamily> On: Senin, Keluarga Harmonis, Akses 05 Mei 2016

⁸³ Laporan tahunan PA Tanjungkarang, tahun 2010; Lihat, Firdaweri dkk., *Perceraian Akibat Tidak Ada Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjungkarang)*, Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2010, h. 119

social dan budaya serta rendahnya pemahaman agama dan pendidikan yang mengakibatkan semakin memburuknya keadaan rumah tangga.

Mengawali kehidupan rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan. Dibutuhkan ketulusan hati serta kesabaran agar permasalahan yang sedang dihadapi dapat segera diselesaikan. Namun, ketika benih-benih ketidakharmonisan mulai muncul diharapkan setiap pasangan segera peka dan melakukan tindakan pencegahan demi menjaga keutuhan rumah tangga. Berikut ini adalah ciri-ciri rumah tangga tidak bahagia yang harus segera ditangani:

a. Sering terjadi perdebatan

Di awal kehidupan berumah tangga perdebatan yang dilakukan oleh sepasang suami-istri bisa dikatakan wajar karena satu sama lain masih berusaha memahami karakter masing-masing. Namun, bila setelah sekian lama hidup bersama tapi masih belum bisa menemukan titik temu, bagaimana mengatasi percekcoakan yang sering terjadi, maka Anda perlu berhati-hati bisa jadi selama ini hubungan Anda dengan pasangan memang tidak bahagia.

b. Komunikasi berkurang

Komunikasi yang baik bertujuan untuk menyamakan persepsi serta cara paling ampuh untuk menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, Anda perlu mengavaluasi kembali bagaimana komunikasi Anda dengan pasangan selama ini berlangsung, jika komunikasi tiba-tiba berkurang jangan biarkan itu berlarut-larut, sehingga membahayakan pernikahan Anda.

c. Saling berbohong

Kejujuran adalah hal terpenting dalam kehidupan berumah tangga, tapi jika masing-masing pasangan sudah tidak lagi bisa saling memercayai dan cenderung lebih suka berbohong, maka Anda harus segera mengatasinya jika masih ingin mempertahankan pernikahan dengannya.

d. Tidak memiliki waktu baik untuk keluarga maupun pasangan

Anda dan pasangan sudah tidak lagi merasa nyaman berada di rumah. Karena itu, Anda lebih suka menghabiskan waktu di tempat kerja atau keluar bersama teman-teman, akibatnya Anda sering tidak memiliki waktu baik untuk anak-anak maupun untuk pasangan Anda.

e. Hilangnya keakraban

Di dalam keluarga tidak hanya terdiri dari suami dan istri, tapi juga melibatkan anak-anak, orangtua dan mungkin sanak saudara yang lain. Ketika tidak ada lagi keakraban di antara anggota keluarga, maka hal ini bisa menjadi indikasi bahwa rumah tangga tersebut sedang bermasalah.

f. Mengonsumsi zat-zat berbahaya

Rumah tangga tidak bahagia penuh dengan tekanan. Tidak jarang mereka yang terlibat di dalamnya berusaha melarikan diri dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan cara mengonsumsi zat-zat berbahaya, seperti alkohol atau narkoba, agar dapat melupakan sejenak permasalahan hidup yang sedang dihadapi.

g. Terjadi perselingkuhan

Masing-masing pasangan sudah tidak lagi memiliki respek terhadap satu sama lain. Tidak jarang untuk mendapatkan kembali kasih sayang ataupun dukungan, suami atau istri melakukan perselingkuhan dengan orang lain.

h. Gesture atau bahasa tubuh

Bahasa tubuh seseorang tidak dapat menyembunyikan suasana hatinya. Karena itu, ketika dalam rumah tangga tidak ada lagi

kebahagiaan, maka tanpa disadari apa yang sedang dialami akan terbawa ke dalam pergaulan sehari-hari.

i. Tidak lagi mempedulikan keluarga

Tidak ada lagi kepedulian di antara suami istri, bahkan kepedulian terhadap anak-anak, dan setiap orang berusaha mencari sendiri kesenangan hidup sesuai dengan apa yang disukainya.

j. Muncul depresi

Rumah tangga yang tidak bahagia jika dibiarkan terus berlarut-larut mampu membuat seluruh anggota keluarga hidup di dalam tekanan. Oleh karena itu, tidak jarang salah satu ataupun beberapa anggota keluarga akhirnya mengalami depresi, dalam skala yang lebih berat dapat membuat seseorang mengalami hilang ingatan.

k. Tidak lagi memiliki tujuan hidup

Di dalam rumah tangga yang tidak bahagia fungsi-fungsi penting keluarga tidak lagi bisa bekerja dengan semestinya. Karena itu, setiap orang akhirnya tidak lagi memiliki tujuan hidup dan melakukan segala sesuatu sekehendak hatinya.

l. Terjadi kemerosotan akhlak dan prestasi

Imbas rumah tangga tidak bahagia sangat luas, salah satunya adalah berkaitan dengan kemerosotan akhlak dan prestasi baik di dalam masyarakat, di tempat kerja ataupun di sekolah.⁸⁴

Berdasarkan uraian mengenai aspek-aspek terciptanya keharmonisan rumah tangga, dapat terwujud dengan memperhatikan hal yang berkaitan dengan proses sebelum dilaksanakan perkawinan, saat perkawinan berlangsung dan setelah terwujudnya perkawinan. Tidak semua aspek dapat dipenuhi dalam sebuah rumah tangga, tetapi minimal setengah dari aspek-aspek tersebut ada dalam kehidupan rumah tangga.

D. Tanggungjawab dalam Rumah Tangga

Perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁸⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁸⁴ [http:// keluarga.com/ authors /Intan Lolitasari](http://keluarga.com/authors/Intan_Lolitasari), dikutip dari majalah Wanita berbahasa Inggris, Akses 10 juni 2016

⁸⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2008), h. 22

(KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.⁸⁶

Definisi keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami, istri dan anak-anaknya. Disebutkan bahwasanya keluarga ialah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab.⁸⁷

Salah satu perhatian (*atensi*) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luwes, adil, dan bijaksana. Andai kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian ini tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.⁸⁸ Keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya; dengan menjalankan kewajiban masing-masing, baik kewajiban **terhadap isteri**, kewajiban **terhadap suami**, dan kewajiban **terhadap anak**.

⁸⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), h. 484

⁸⁷ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah*, (Terbit Terang, Surabaya, 1998), h. 7

⁸⁸ Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta), h. 7

BAB III

METODE PENELITIAN

Métode adalah proses, atau prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan pnelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan

manusia, oleh karenanya metode penelitian menurut Iqbal Hasan,⁸⁹ dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian dan membicarakan urutan kerja dan teknik penelitian, membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dapat juga *research* ini diartikan sebagai suatu cara untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran dengan ciri *objectivitas*, karena kebenaran yang diperoleh secara *konseptual* atau *deduktif* saja tidaklah cukup, tetapi harus diuji secara *empiris*.⁹⁰

Mencermati maksud dari penelitian tersebut, dapat dipahami, bahwa penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun, untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir, yakni secara *empiris* atau melalui pengalaman. Oleh karenanya untuk menemukan *métode* ilmiah, maka digabungkanlah antara *métode* pendekatan *rasional* dan *métode* pendekatan *empiris*. *Rasionalisme* memberikan kerangka pemikiran yang *logis*, sedangkan *empirisme* memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran (mengkaji hukum sebagai pola perilaku).⁹¹

⁸⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 21

⁹⁰ Lihat, Sedarmayanti dan Syarif Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung, 2002, h. 27

⁹¹ Bandingkan, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 128

Pembahasan dalam *desain* penelitian ini, meliputi beberapa hal, yaitu jenis dan sifat penelitian dan pendekatan masalah.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian atau *inkuiri naturalik* atau alamiah, permasalahannya bersifat umum dan terbuka.⁹² Penelitian ini lebih pada penelitian (*field research*) penelitian lapangan yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya”.⁹³ Jenis penelitian kualitatif adalah normatif empris (*applied law research*) yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan (undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹⁴

Dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk menggali data yang bersumber dari masyarakat itu sendiri atau dari lokasi penelitian yaitu di RT 02 Kelurahan Rajabasa Nunyai Bandar Lampung.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif-analitis, maksudnya bahwa dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan

⁹² Alini Ilyas, *Metodelogi Penelitian*, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung, 2003, h.5

⁹³ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1994, h.142

⁹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 132

bukan berupa angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara, norma-norma hukum, catatan lapangan, catatan memo dan dokumen resmi lainnya,⁹⁵ dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populas atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.⁹⁶

Klasifikasinya secara khusus adalah, bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.⁹⁷

Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian jenis lainnya. Menurut Bogdan dan Biklen mengajukan ada 5 ciri, yaitu:⁹⁸

⁹⁵ Lexi. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 3-4

⁹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 36

⁹⁷ Lihat Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2008), h. 4-5

⁹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 9-10

- a. Latar Alamiah, dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
- b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
- c. Penelitian lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*.
- d. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
- e. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

Sedangkan jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.⁹⁹ Alasan digunakannya jenis penelitian deskriptif adalah karena dengan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu tertentu dengan waktu yang lain, atau dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain, dan dapat menemukan teori. Yaitu menggambarkan serta menjelaskan: apa yang melatarbelakangi suami melakukan poligami di RT 02 Kelurahan

⁹⁹ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2005), h. 42

Rajabasa Nunyai Bandar Lampung dan bagaimana relevansinya poligami dengan keharmonisan rumah tangganya.

Lebih detil lagi bahwa maksud dari *deskriptif-analitis* adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan secermat mungkin mengenai objek, gejala, atau kelompok tertentu,¹⁰⁰ atau untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan,¹⁰¹ tentang apa yang melatarbelakangi suami melakukan poligami di RT 02 Kelurahan Rajabasa Nunyai Bandar Lampung dan bagaimana relevansinya dengan keharmonisan rumah tangganya.

Selanjutnya, penelitian ini juga bersifat hukum normatif-empiris (*applied-normatif*) adalah perilaku nyata (*in action*) dimana setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah pihak yang terkait telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau Undang-undang)¹⁰² atau penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi ditengah masyarakat.¹⁰³

¹⁰⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 131

¹⁰¹ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), h. 234

¹⁰² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 132-134

¹⁰³ *Ibid.*, h. 68

Penelitian empiris ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan atau lokasi penelitian, dalam hal ini di RT 02 Kelurahan Rajabasa Nunyai Bandar Lampung. Selain penelitian lapangan, penulisan ini juga dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Library Research atau studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.¹⁰⁴ Penelitian Library Research dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur seperti al-Qur'an, Hadis, buku-buku Fikih dan Undang-undang serta literatur lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Tujuan dari library Research ini untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat dalam kepustakaan, misalnya berupa buku, majallah, jurnal dan atau naskah dan dokumen-dokumen lainnya.¹⁰⁵

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dan *yuridis empiris* (sosiologis). Melalui pendekatan *normatif*, akan disoroti ketentuan yang berkaitan dengan para pihak (suami) yang melaksanakan perkawinan poligami, dan untuk meneliti atau mengidentifikasi aturan-aturan yang

¹⁰⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 50

¹⁰⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 33

berlaku, apakah sesuai dengan penerapannya di lapangan.¹⁰⁶ Pendekatan sosiologis ini mendasarkan pada Pandangan *positivistik* yang berpegang teguh pada teori *korespondensi* tentang kebenaran.¹⁰⁷ Oleh karenanya penelitian ini difokuskan untuk mencari data dan informasi tentang: apa yang melatarbelakangi suami melakukan poligami, dan bagaimana relevansinya poligami dengan keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung?

D. Sumber Data

Perlu ditegaskan bahwa data adalah d skripsi dari suatu kejadian yang dihadapi. Kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata, data merupakan bentuk yang belum dapat memberi manfaat besar bagi penerimanya, karenanya diperlukan suatu proses pengolahan sehingga bisa memberikan suatu informasi yang berguna bagi penerimanya.¹⁰⁸

Pengumpulan data, diperoleh dengan menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pelaku poligam dan atau sumber-sumber yang memberikan data langsung

¹⁰⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 12

¹⁰⁷ Bruggink, J.J.H. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa oleh B. Arief Sidharta. Bandung : Citra Aditya Bakti. h. 185.

¹⁰⁸ [http://b.domaindlx.com/.../data informasi.htm](http://b.domaindlx.com/.../data%20informasi.htm), diakses 20 Oktober 2014

dari tangan pertama¹⁰⁹, atau data yang diperoleh dari sumber aslinya.¹¹⁰ Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang berasal dari pelaku poligami sebanyak 2 orang di kelurahan Rajabasa, ditambah Ketua RT dan Tokoh Agama.

2. Data Skunder

Sumber data skunder merupakan sekumpulan data yang akan menopang data primer yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yakni data yang didapatkan melalui teori dan pendapat para ahli hukum. Penelitian diperoleh dari buku-buku fikih yang berhubungan dengan obyek penelitian. antara lain buku-buku¹¹¹ yang bersifat klasik maupun kontemporer; bahkan menurut Iskandar, termasuk juga kedalam kategori yang diperoleh melalui pengumpulan data yang bersifat studi dokumentasi yang berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, *referensi-referensi*, atau peraturan (*literature* laporan, tulisan, dan lainnya yang memiliki relevansinya dengan fokus permasalahan penelitian,¹¹² Undang-undang tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. yang banyak memuat permasalahan poligami.

¹⁰⁹. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Sumbangsih, Yogyakarta, 1974, h. 2

¹¹⁰ Louis Gootshalk, *Understanding History a Primer of Historical Method*, Penerjemah Nograho Noto Susanto, (Jakarta: UI Press, 1985), h. 32

¹¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 30

¹¹² Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, Gaung Persada Press, 2008, h. 77

Selain itu, juga menganalisis masalah-masalah *teoritis yuridis*, dan mengumpulkan pendapat para ahli dibidang hukum, khususnya yang menyangkut cara dan penetapan hukum perkawinan berpoligami, relevansinya dengan keharmonisan rumah tangga

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dapat dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para pihak yang berpoligami atau diperoleh dari sumber aslinya,¹¹³ dan data sekunder dapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan, atau data yang diperoleh secara tidak langsung dengan aslinya.¹¹⁴ Atau dapat diperoleh melalui penelusuran literatur dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan hukum sebagai pelengkap dan penyempurna, sebagai berikut:

1. Bahan hukum *primer*, yakni bahan hukum yang mengikat, misalnya: Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al-qur'an, Kitab fikih maupun hadi's yang ada relevansinya dengan perkawinan *khunsa*;
2. Bahan hukum *sekunder* yang meliputi karya ilmiah para ahli hukum, hasil penelitian ilmiah, hasil seminar dan lain-lain;

¹¹³Lihat, Louis Gootshalk, *Understanding Historya Primer of Historical Method*, terjemah: Nograho Noto Susanto, (Jakarta, UI Press, 1985), h. 32

¹¹⁴ Louis Gootshalk, *Understanding Historya Primer of Historical Method*, terjemah: Nograho Noto Susanto, (Jakarta, UI Press, 1985), h. 95

3. Bahan hukum *tersier* yakni bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

F. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya mengolah data yang masih mentah untuk menjadi data yang sistematis, sehingga dapat memberikan arti dan dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Dalam mengolah data, digunakan analisa *kualitatif* (*non* statistik), karena data yang diperoleh merupakan data *deskriptif*. Hal ini sependapat dengan Sumadi yang mengemukakan pendapatnya bahwa, penelitian harus memastikan pola analisa mana yang akan digunakannya. Apakah analisis statistik atau analisis *non* statistik..¹¹⁵

Data yang diperoleh, di-*edit* untuk mencocokkan jawaban yang bervariasi dan selanjutnya dianalisis secara *kualitatif*, yakni akan menguraikan atau menjelaskan data yang diperoleh untuk menunjukkan bagaimana cara menentukan latarbelakangi suami melakukan poligami, dan menentukan bagaimana relevansinya poligami dengan keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung.

¹¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, CV. Rajawali, Jakarta, 1991, h. 39

2. Penyajian Data

Display data atau penyajian data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Melalui penyajian data tersebut, maka terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah diorganisir kedalam matriks analisis data, akan disajikan dalam bentuk teks *naratif*.

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara *kualitatif*.¹¹⁶ Analisis data *kualitatif* adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹¹⁷ Dimaksud dengan analisis disini adalah, sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian, secara logis, sistematis, dan “mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian”.¹¹⁸ Logis sistematis menunjukkan cara berfikir *deduktif-induktif* dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk

¹¹⁶ Analisis Kualitatif, artinya menguraikan data dalam bentuk yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis; Lihat, Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, h. 127

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, h. 12; Lihat. Jiko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori & Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h. 105

¹¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung, 1989, h. 112

memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesa.¹¹⁹

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai masalah yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir *deduktif*. Cara berfikir *deduktif* yaitu metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹²⁰

G. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian *kualitatif* dapat bersifat sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten dikala mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis, dan mencari makna dari kata yang dikumpulkan. Dan pada akhirnya setelah data terkumpul akan diperoleh suatu kesimpulan.

¹¹⁹ . Lexy J. Moleong, *Ibid*, h. 106

¹²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, h. 28

Konklusi atau kesimpulan dalam penelitian *kualitatif* tidak memerlukan angka-angka atau pengujian statistik untuk mendasari kesimpulan. Sebaliknya kesimpulan dalam penelitian *kualitatif* berbentuk *deskripsi kualitatif*, yang merupakan kristalisasi dan konseptual dari temuan lapangan.¹²¹

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil Kelurahan Rajabasa

¹²¹ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Cet.I, STIA-LAN Press, Jakarta, 1999. h. 111

a. Sejarah Singkat dan Keadaan Geografis Kelurahan Rajabasa

Desa Rajabasa adalah salah satu desa yang sejak tahun 1992 menjadi Kelurahan Rajabasa Kecamatan Kedaton Kodya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dan sesuai dengan Perda yang baru yaitu Perda No. 4 tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan, masuk kedalam Kecamatan Kedaton tetapi masuk kedalam Kecamatan Rajabasa, yang terdiri dari 4 kelurahan yaitu: Kelurahan Rajabasa, Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kelurahan Rajabasa Raya, dan Kelurahan Gedung Meneng.

Berdasarkan keterangan- keterangan dari tua-tua kampung dan pemuka masyarakat, bahwa Kelurahan Rajabasa adalah Desa asli yang sudah sejak zaman dahulu, penduduknya terdiri dari suku asli Lampung. Untuk mengetahui dengan pasti kapan mulai terbentuknya Desa Rajabasa adalah sulit, karena tidak adanya data yang otentik. Kira-kira pada tahun 1901 Desa Rajabasa sudah mempunyai Pemerintah suku dan penduduknya termasuk suku Lampung Abung yang tergabung dalam marga “Sinar Siwo Migo”

Desa atau Kelurahan Rajabasa adalah satu Kelurahan dari Sembilan Desa dalam satu marga tersebut, yang sekarang masih ada tujuh Desa yaitu :

- a) Desa Muara Putih (Kecamatan Natar Lampung Selatan)
- b) Desa Rajabasa

- c) Desa/ Kelurahan Gedung Meneng
- d) Desa/ Kelurahan Labuhan Ratu
- e) Desa Gunung Agung
- f) Desa/ Kelurahan Langkapura
- g) Desa/ Kelurahan Jagabaya 1

Ketujuh Desa/ Kelurahan tersebut dulu berada dalam wilayah Pemerintahan Marga Balau dan sebagai Kepala Pemerintahan disebut “PESIRAH”. Sesudah adanya sistem pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1945 Kelurahan Rajabasa termasuk dalam wilayah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Pada waktu Kepala Desa dijabat oleh Bapak M. Rais pada tahun 1961 Pemerintah Marga Balau dirubah menjadi “NEGERI BALAU”.

Kemudian dengan adanya perubahan batas wilayah Kecamatan, maka Kelurahan Rajabasa dimasukkan kedalam wilayah Kecamatan Kedaton Kabupaten datu II Lampung Selatan. Menurut keterangan tua-tua kampoeng sejak dahulu hingga sekarang ada sekitar 18 orang Kepala Desa/ Kepala Kelurahan yang pernah memegang Pemerintahan di Kelurahan Rajabasa.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 1982, tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Tanjung Karang Teluk Betung), maka Kelurahan Rajabasa menjadi salah satu kelurahan yang termasuk kedalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dan pada

tahun 1992 perubahan desa menjadi Kelurahan Rajabasa Kecamatan Kedaton.

Pada tanggal 1 Januari 1992 masuk wilayah Kecamatan Rajabasa hasil dari pemekaran Kecamatan, beberapa suku bangsa yang ada di Kelurahan Rajabasa Kecamatan Raja Basa adalah sebagai berikut :

- a) Suku bangsa asli Lampung
- b) Suku Palembang
- c) Suku Semendo/ Ogan
- d) Suku Komering
- e) Suku Minang
- f) Suku Batak
- g) Suku Sunda
- h) Suku Jawa
- i) Dan lain- lain

Tabel 1. Pegawai Pengurus Kantor Kelurahan Rajabasa

Pengurus	Nama
----------	------

1. Ketua	Zairin, A. Ma.Pd
2. Wakil Ketua I	Jamal Muhammad Nasir.S.
3. Wakil Ketua II	E Firmansyah
4. Sekretaris	Ir. Beni Hidayat. M.Si
5. Wakil Sekretaris	Hanafi Rozak
6. Bendahara	Abdul Karim.
7. Wakil Bendahara	S.H

Sumber: Laporan Kependudukan Kelurahan Rajabasa tahun 2014;
akses 05 Agustus 2016

Tabel 2. Pegawai seksi- seksi Kantor Kelurahan Rajabasa

Seksi- seksi	Nama
1. Agama dan Pembinaan Mental	1. Ibrahim. S 2. Drs. Baharuddin. M.Hum
2. Perencanaan Pembangunan	1. Drs. Usman 2. M. Akil
3. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	1. A. Ruski Nunyai 2. Marhanan Sopiyan. S.H
4. Kesejahteraan Sosial	1. Ny. Maspah Zen 2. Ny. Masropah
5. Pendidikan	1. Musanif 2. Hermasyah. S.Ag
6. Pemuda dan Olahraga	1. Dahlan Zakaria 2. Rusli Umar. S.E
7. Hukum dan HAM	1. Bambang Hartono. S.H., M.Hum 2. Drs. H. Efendi Rambe

8. Keamanan dan Ketertiban	1. Zaharman 2. Amrin Ayub
----------------------------	------------------------------

b. Keadaan Demografi

Penduduk di Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung terdiri dari berbagai suku bangsa. Sampai dengan tahun 2008, berdasarkan Data Statistik Kelurahan Rajabasa berpenduduk 15.980 jiwa. Dalam wilayah Kelurahan Rajabasa terdapat 3 buah Taman Kanak-kanak, 3 buah SD, 1 buah SLTP, 2 buah Perguruan Tinggi, 1 buah Lembaga Pendidikan Agama, dan 1 buah Lembaga Kursus/ Bimbingan Belajar.

c. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Untuk mengetahui jumlah penduduk Kelurahan Rajabasa berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2008

No	Uraian	Jumlah
1.	Laki-laki	8.998
2.	Perempuan	6.982
	Jumlah	15.980

Sumber: Laporan Kependudukan Kelurahan Rajabasa tahun 2010.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa penduduk yang ada di Kelurahan Rajabasa berjumlah 15.980 jiwa, dimana dari jumlah tersebut yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 6.982 jiwa atau 43.69% dan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki

sebanyak 8.998 jiwa atau 56.31%. Dengan demikian, maka dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Rajabasa, tampak bahwa penduduk berjenis kelamin laki-laki memiliki jumlah yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

d. Keadaan Penduduk Menurut Usia

Untuk mengetahui jumlah penduduk Kelurahan Rajabasa berdasarkan usia, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Usia Pada Tahun 2008

No.	Golongan Usia	Jumlah
1.	0-4 Tahun	560
2.	5-6 Tahun	1.334
3.	7-13 Tahun	2.974
4.	14-16 Tahun	1.689
5.	17-24 Tahun	1.690
6.	25-54 Tahun	3.854
7.	55 Tahun keatas	3.879
	Jumlah	15.980

Sumber: Laporan Kependudukan Kelurahan Rajabasa tahun 2010.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa penduduk di Kelurahan Rajabasa berdasarkan umur terbanyak jumlahnya adalah

penduduk pada usia produktif yakni usia 17–54 tahun. Hal ini berpengaruh terhadap perekonomian Kelurahan Rajabasa itu sendiri, semakin banyak jumlah penduduk usia produktif maka akan banyak pula karya yang dihasilkan sehingga mendorong berkembangnya perekonomian. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah anak-anak usia 0–4 tahun.

e. Keadaan Penduduk Menurut Agama

Agama merupakan salah satu hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Agama mengatur tentang banyak hal, antara lain tentang perkawinan. Dalam pasal 2 UU No 1/1974 tentang perkawinan ayat (1) berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Secara lebih terperinci jumlah penduduk di kelurahan Rajabasa berdasarkan agama yang dianut sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Agama Pada Tahun 2008

No	Uraian	Jumlah
----	--------	--------

1.	Islam	15.513
2.	Kristen Protestan	310
3.	Kristen Katolik Hindu	110
4.	Budha	32
5.		15
	Jumlah	15.980

Sumber: Laporan Kependudukan Kelurahan Rajabasa tahun 2010.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penduduk di Kelurahan Rajabasa mayoritas menganut agama Islam yaitu sebanyak 15.513 jiwa atau 97.08% dan yang menjadi minoritas agama Budha yang dianut sebanyak 15 jiwa atau 0.09%.

f. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui jumlah penduduk Kelurahan Rajabasa berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Pada Tahun 2008

No	Uraian	Jumlah
-----------	---------------	---------------

1.	TK	1.720 orang
2.	SD/ Sederajat SLTP/	2.600 orang
3.	Sederajat SLTA/	2.836 orang
4.	Sederajat D1	2.630 orang
5.	D2	15 orang
6	D3	18 orang
7	S1	13 orang
8		40 orang
	Jumlah	15.980

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa mayoritas penduduk di Kelurahan Rajabasa adalah siswa SD hingga SLTA dengan jumlah 8.066 jiwa atau 50.48%.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Rajabasa yang tertinggi jumlahnya adalah tamatan SLTP dan SLTA yang berjumlah 2.836 dan 2.630 orang. Sedangkan jumlah terendah yaitu pendidikan D3, sementara penduduk yang buta huruf tidak ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kelurahan Rajabasa telah menyadari arti penting pendidikan yang ditunjukkan melalui tingginya jumlah penduduk tamatan SLTP dan SLTA dan tidak ditemukannya penduduk yang buta huruf.

g. Sarana Ibadah

Di Kelurahan Rajabasa terdapat dua jenis sarana peribadatan yaitu masjid dan mushola. Masjid sebanyak 18 buah dan mushola sebanyak 3 buah. Sedangkan untuk sarana peribadatan gereja, vihara dan pura tidak tersedia. Data ini dihimpun sebelum terjadinya pemekaran kelurahan Rajabasa menjadi 4 kelurahan.

2. Data Poligami

Terciptanya suatu kondisi ditengah masyarakat tidak terlepas dari berbagai faktor yang mmempengaruhi baik faktor lingkungan, sosial, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Semua faktor tersebut saling mempengaruhi sikap dan tingkah laku manusia yang berlaku di lingkungannya, termasuk dengan adanya poligami, terlebih yang apabila poligami tersebut dilakukan dibawah tangan, banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya adalah faktor keinginan atau nafsu syahwat sebagai pendorongnya dan yang kedua adalah faktor ekonomi.

Faktor pertama, nafsu merupakan pendorong yang sangat kuat terjadinya kasus poligami, karena nafsu memang kebutuhan biologis yang diciptakan oleh Allah bagi setiap makhluknya. Belum lagi bagi mereka yang memiliki kelainan seks seperti hiperseks, maka tidaklah cukup hanya dengan satu isteri saja.

Faktor kedua, terjadinya kasus poligami yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi sebagai alat penunjang kehidupan rumah tangga merupakan kebutuhan primer yang harus dipertahankan kestabilannya

yaitu, stabilnya kondisi ekonomi yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Apalagi bagi keluarga yang berpoligami, ekonomi sangat mendukung harmonis atau tidaknya kehidupan keluarga karena suami tidak hanya menghidupi satu isteri dan tentunya harus pula menghidupi anak-anak dari isteri-isteri tersebut. Namun bukan berarti dorongan nafsu dan ekonomi saja sebagai faktor terjadinya poligami, tetapi faktor lainpun tidak menutup kemungkinan menjadi sebab terjadinya poligami.

Hasil penelitian yang telah diperoleh lapangan, jumlah kasus poligami yang menjadi sumber primer dan telah berhasil diwawancarai dalam penelitian ini yaitu 2 kasus. Maka akan diungkapkan identitas diri sebagai sumber data primer yang akan dijelaskan dalam bentuk data sebagai berikut:

Tabel 7 Data poligami tidak tercatat

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Suku
1	Andri	38 tahun	SMA	Honorar	Lampung
2	Harjono (Jono)	45 tahun	SMA	Wiraswasta	Sunda/ Banten

Sumber: Penelitian dan wawancara. Tanggal 30 Agustus 2016

- a. Nama : Andri
- Umur : 38 tahun
- Pekerjaan : Honorar Dinas Perhubungan Bandar Lampung

Suku : Lampung (kelahiran Daya Murni Tulang
Bawang)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA

Bapak (Andri) berpoligami selama lebih kurang 7 tahun dan memiliki 2 (dua) orang isteri. Isteri pertama dinikahi secara sah menurut agama dan Negara, sedangkan pernikahan selanjutnya dilakukan secara sirri (dibawah tangan).¹²² Dari pernikahan isteri pertama mempunyai 2 orang anak, sedangkan dari isteri yang kedua memiliki 2 orang juga, disamping mempunyai 1 orang anak bawaan dari isteri kedua. Yang menjadi alasan bagi pelaku (Bapak Andri) memiliki dua orang isteri karena berawal dari main-main dengan isteri kedua yang sudah janda diceraikan hidup oleh suaminya. Keinginan tersebut lebih kepada berkesempatan menuruti nafsu semata. Sedangkan bagi si wanita (bernama Ike) mau-mau saja selama kebutuhan mereka dapat dipenuhi untuk menghidupi 1 orang anak bawanya, meskipun hanya bertempat tinggal berpindah-pindah dari kost yang satu ketempat kost yang lain.¹²³ Pada awalnya isteri pertama dari Bapak Andri sama sekali tidak tau, namun lama kelamaan diketahuinya juga.

Perlu diketahui bahwa setiap suami yang berkehendak untuk menikah lagi harus ada izin dari istri pertama, meskipun demikian

¹²² Wawancara dengan Ike, isteri kedua dari Andri, tanggal 7 September 2016

¹²³ Wawancara dengan Bapak Andri, 10 September 2016

Bapak Andri menempuh jalan sembunyi-sembunyi tanpa ada persetujuan dari isteri pertamanya, hal tersebut tidak menjadi penghalang dilaksanakannya pernikahan bagi bapak andri.

Ada hal yang menarik didalam rumah tangga pasangan poligami ini, yakni anak dari bawaan Ike (isteri kedua) ini, selalu mendapat amarah dari Andri, bahkan apabila anak yang diperoleh dari Andri ini, jatuh, atau menangis, maka yang dipersalahkan adalah anak bawaan dari Ike, bahkan tidak jarang mendapat kekerasan dari Andri, lebih dari itu, seringkali mendapat perlakuan kasar dan diusir oleh Andri. Hal ini tampak Andri tidak menerima kehadiran anak bawaan dari Ike, inilah yang seringkali menimbulkan akar pertengkaran suami isteri yang berpoligami ini.¹²⁴

Hingga saat ini hubungan keluarga masih terjaga dengan baik, meskipun kadang-kadang terjadi pertengkaran antara isteri pertama dan kedua. Isteri kedua justru tidak pernah mempermasalahkan apapun. Beliau meneerima saja atau kata orang jawa dikenal dengan istilah “*nrimo*.”¹²⁵ Hubungan antara istri kedua dengan istri pertama tergolong tidak harmonis. Hal ini terbukti isteri pertama selalu mendatangi istri kedua dengan alasan mencari keberadaan suaminya (Bapak Andri), sehingga kadang-kadang terjadi percek-cokan disebabkan karena kecemburuan, iri, dan merasa kurang adil dalam hal pembagian waktu.

¹²⁴ Wawancara dengan Ike, isteri kedua dari Andri, tanggal 08 September 2016

¹²⁵ Menerima apa adanya, ketimbang tidak ada suami yang mendampingi hidup dalam rumah tangganya.

Menurut pengakuan dari isteri kedua (Ike), dalam 3 tahun terakhir ini, Bapak Andri jarang memberi nafkah lahir, meskipun memberi hanya terkadang saja, dan itupun jauh dari berkecukupan, akibatnya isteri kedua banting tulang mencari pekerjaan asisten rumah tangga di tiga tempat untuk menopang kehidupan 3 orang anak dalam asuhannya.¹²⁶

- b. Nama : Harjono (Jono)
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta.
Suku : Sunda (Banten)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA

Bapak Harjono (Jono) berpoligami selama lebih kurang enam tahun dan memiliki dua orang isteri. Isteri pertama dinikahi secara sah menurut agama dan Negara, sedangkan isteri kedua dinikahi secara sirri.¹²⁷ Kedua isteri beliau tinggal terpisah. Isteri pertama tinggal di Gading Rejo Pesawaran dan isteri kedua dikontrakkan di kelurahan Rajabasa Bandar Lampung. Rumah tangga bapak Jono dan ibu Mia (isteri pertama Bapak Jono) ini tergolong kurang harmonis sejak bapak Jono menikah lagi dengan Atun¹²⁸. Pernikahan kedua bapak Jono ini

¹²⁶ Wawancara dengan Ike, isteri kedua dari Andri, tanggal 08 September 2016

¹²⁷ Wawancara dengan Ibu Atun, Istri kedua dari bapak Jono, wawancara tanggal 30 Agustus 2016

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Mursyid Hamid, Ketua RT 02 Rajabasa, yang secara kebetulan Ibu Atun mengontrak/ kost di tempat bedeng milik Bapak Mursyid, tanggal 20 Agustus 2016

tidak diketahui oleh isteri pertama. Ketika pernikahan sudah dilaksanakan, barulah beliau berterus terang bahwa dirinya telah menikah lagi. Tentu saja isteri bapak Jono ini terkejut dan merasa tidak terima bahwa suaminya telah menikah lagi. Belum lagi anak sulungnya yang sudah dewasa. Si sulung juga tidak terima bapaknya memiliki isteri dua. Hal ini berlangsung hingga menyebabkan antara isteri tua dan isteri muda kurang baik.

Mereka sering bertengkar dan si bapak (jono) pernah sampai menampar isteri (pertama) nya. Belakangan diketahui bahwa isteri keduanya merupakan mantan pacar bapak Jono sebelum menikah dengan ibu Mia. Isteri pertama bapak Jono tidak terima bahwa ia dipoligami sehingga ia sering mendatangi kontrakan isteri kedua dengan membawa serta anak-anaknya. Bahkan pernah suatu ketika isteri kedua bapak Jono sedang menunggu warungnya, tiba-tiba isteri pertama ini datang, kemudian marah-marah dan mengacak-acak dagangan isteri kedua suaminya.

alasan suami melakukan poligami karena mereka menginginkannya atau dengan istilah lain dikarenakan dorongan nafsu syahwat semata (terngiang dengan isteri kedua sebagai mantan pacarnya).¹²⁹ Lebih lanjut menurut Jono, mengatakan bahwa alasan beliau melakukan poligami karena perempuannya yang ingin dinikahi, dan terdorong ekonomi yang dimiliki, padahal dahulunya tidak

¹²⁹ Wawancara dengan Atun, isteri kedua yang sekaligus mantan pacar Bapak Jono, tanggal 3 September 2016.

memiliki niat untuk menikah lagi. Tetapi, setelah ekonomi mulai membaik, saat itulah jono ingin menikah lagi.¹³⁰

Membangun rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan dambaan setiap insan yang paling hakiki. Namun untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah semudah mengatakannya. Membutuhkan kerjasama yang baik antara suami dan istri, membutuhkan sikap saling mengerti dan memahami agar semua yang diimpikan dapat terwujud.

Tak terkecuali rumah tangga yang poligami. Pada kasus ini tentunya dibutuhkan kerjasama ekstra dibandingkan rumah tangga yang monogami. Karena dalam hal ini bukan hanya satu istri yang harus diajak kerjasama, melainkan beberapa orang istri bahkan harus menghadapi anak-anak dari para istri tersebut.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang berpoligami, yaitu:

- a. Sikap dan sifat seorang istri; ini sangat menentukan harmonis atau tidaknya rumah tangga, misalnya sifat sabar dan menerima apa adanya. Karena jika istri tidak sabar dan selalu menuntut tentu akan menjadi penyebab timbulnya peretngkaran;
- b. Faktor ekonomi;
- c. Faktor ekonomi akan berpengaruh terhadap kebahagiaan rumah tangga bila berada pada taraf yang sangat rendah. Terutama pada rumah tangga

¹³⁰ Bpaka Jono, pelaku poligami, wawancara pada tanggal 05 September 2016

- yang poligami, tentunya kebutuhan menjadi dua kali lipat dan membutuhkan kerja yang sangat keras agar kebutuhan dapat terpenuhi;
- d. Poligami harus dilakukan secara terbuka dan jujur terhadap istri; apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi justru akan menjadi permasalahan jika suatu saat istri mengetahui atau suami berterus terang setelah ia menikah lagi
 - e. Berusaha untuk bersikap adil (tidak pilih kasih); adil disini yaitu segala sesuatunya dibagi sama rata, terutama dalam hal nafkah;
 - f. Komunikasi yang baik antar istri dan anak-anak.¹³¹

Salah satu perhatian (*atensi*) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luwes, adil, dan bijaksana. Andai kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian ini tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.¹³²

Jenis perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang pada tahun 2015 hingga penelitian lapangan ini dilaksanakan, terkonsentrasi pada sembilan perkara yang masuk untuk disidangkan, yakni perkara perwalian sebanyak 8 perkara,

¹³¹ Dirangkum dari hasil Penelitian teoritis dan wawancara dengan pelaku poligami di kelurahan Rajabasa Bandar Lampung pada tanggal 20 Agustus -15 September 2016 .

¹³² Haikal Abduttawab , *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, h. 7

pengesahan anak sebanyak 1 perkara, permohonan pembagian harta bersama sebanyak 3 perkara, cerai gugat sebanyak 423 perkara, cerai talak sebanyak 136, pembatalan perkawinan sebanyak 1 perkara, izin poligami sebanyak 1 perkara, dispensasi perkawinan sebanyak 1 perkara, dan yang terakhir adalah perkara kewarisan sebanyak 7 perkara.¹³³

Total keseluruhan perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang pada tahun 2015 hingga bulan Maret adalah 585 perkara. Keseluruhan perkara tersebut telah disidangkan dan diputus pada tahun yang sama. Berikut ini rilis data yang didapat secara resmi dari Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang untuk Tahun 2015, dan dapat pula diakses di website resmi Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang.

Tabel. 8. Jenis Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Tahun 2015

No	Jenis Perkara	Total
1	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0 Perkara
2	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
3	Perwalian	8 Perkara
4	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
5	Pengesahan Anak	1 Perkara
6	Hak Hak Bekas Istri	0 Perkara
7	Nafkah Anak oleh Ibu	0 Perkara
8	Penguasaan Anak	0 Perkara

¹³³ Diolah dari laporan resmi yang terdapat pada Dokumen Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang tahun 2015

9	Harta Bersama	3 Perkara
10	Cerai Gugat	423 Perkara
11	Cerai Talak	136 Perkara
12	Kelalaian Atas Kewajiban	0 Perkara
13	Pembatalan Perkawinan	1 Perkara
14	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0 Perkara
15	Pencegahan Perkawinan	0 Perkara
16	Izin Poligami	1 Perkara
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0 Perkara
18	Asal Usul Anak	0 Perkara
19	Penetapan Kawin Campur	0 Perkara
20	Isbat Nikah	4 Perkara
21	Izin Kawin	0 Perkara
22	Dispensasi Kawin	1 Perkara
23	Wali Adhal	0 Perkara
24	Pengangkatan Anak	0 Perkara
25	Ekonomi Syariah	0 Perkara
26	Kewarisan	7 Perkara
27	Wasiat	0 Perkara
28	Hibah	0 Perkara
29	Wakaf	0 Perkara
30	Zakat/Infak/Shadaqah	0 Perkara
31	P3HP	0 Perkara
32	Lain-Lain	0 Perkara
	Jumlah Total	585 Perkara

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang tahun 2015

Sebagai bahan pijakan dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tanjungkarang, dapat diketahui, bahwa hanya 1 perkara dari

585 perkara yang diputus pada tahun 2015, tentang pengajuan izin berpoligami. Dengan demikian berapa banyak poligami di Bandar Lampung, termasuk di kelurahan Rajabasa, yang melakukan poligami dan tidak tercatat/terdaftar di Pengadilan Agama Tanjungkarang. Bahkan menurut Kepala KUA Rajabasa Bandar Lampung, tidak ditemukan bagi pelaku poligami yang tidak tercatat di KUA, untuk melaksanakan perkawinan di depan petugas pencatat perkawinan (KUA), kecuali yang memiliki izin resmi dari Pengadilan Agama.¹³⁴

3. Dampak Poligami Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan undang-undang yang mengatur tatacara perkawinan dan perceraian di Indonesia. Sedangkan bagi mereka yang Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun hukum materiil bagi orang Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya menganut asas monogami, satu suami untuk satu istri. Dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang. Hal atau alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat. Dapat

¹³⁴ Wawancara dengan Kepala KUA Rajabasa bandar Lampung, 10 September 2016.

tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan termaksud.

Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berkaitan langsung dengan poligami adalah dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Adapun alasan diizinkan suaminya berpoligami terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan.

Realita yang ada di tengah masyarakat Kelurahan Rajabasa rata-rata pernikahan pelaku poligami dilakukan secara sirri atau dibawah tangan, artinya poligami tersebut dilaksanakan tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama sebagai lembaga resmi yang menangani masalah perkawinan bagi yang beragama Islam. Padahal jika mereka meminta izin kepada Pengadilan Agama sebelum dilaksanakannya poligami, akan sulit untuk mendapatkan izin tersebut jika alasan dan syarat yang ditentukan tidak terpenuhi. Adapun alasan yang mereka kemukakan yaitu: keinginan dari diri pelaku dan didorong rasa cinta terhadap seseorang, karena faktor ekonomi, mereka merasa mampu memenuhi kebutuhan jika beristri lebih dari seorang, karena istri tidak dapat memberikan keturunan, dan karena perselingkuhan. Dilihat dari alasan-

alasan tersebut, rata-rata mereka memiliki alasan yang tidak sesuai dengan alasan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kecuali alasan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adanya alasan tersebut di atas, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan izin poligami. Sebenarnya alasan dan syarat yang terdapat dalam prosedur poligami merupakan jalan untuk tidak memudahkan poligami meskipun poligami diperbolehkan jika benar-benar dalam keadaan darurat sehingga perlu ditentukan alasan sedemikian rupa agar tidak ada pihak yang dirugikan. Lagi pula Undang-undang Perkawinan pada dasarnya menganut azas monogami, seorang suami untuk seorang istri. Dengan adanya alasan dan syarat tersebut yang terdapat dalam undang-undang saling mendukung untuk mempertahankan azas monogami. Jadi, bagi mereka yang benar-benar ingin berpoligami, pilihannya adalah menikah dibawah tangan daripada harus meminta izin kepada Pengadilan Agama.

Setiap perbuatan akan menimbulkan suatu dampak, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak yang timbul dari kasus poligami dengan alasan yang tersebut di atas yaitu:

- a. Terjadinya kasus pernikahan di bawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatn Sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga perkawinan dianggap tidak sah menurut Negara walaupun sah menurut agama. Meskipun perkawinan dibawah tangan bukan hanya dari para pelaku poligami, tetapi setidaknya akan menambah jumlah kasus perkawinan di bawah tangan.

- b. Konsekuensi dari perkawinan dibawah tangan, akan memunculkan kasus perceraian dibawah tangan pula. Karena, jika rumah tangga sering terjadi konflik dan tidak ada lagi jalan keluarnya, maka alternatif terakhir adalah perceraian. Untuk bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, mereka tidak memiliki buku (akta) nikah, sedangkan untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan harus menyertakan buku (akta) nikah sebagai bukti bahwa mereka dahulu menikah secara resmi.
- c. Akibat dari perceraian di bawah tangan tersebut tidak bisa menikah lagi secara resmi menurut ketentuan pemerintah karena dari perceraian yang mereka lakukan tidak ada surat bukti bahwa mereka sudah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, sehingga pada akhirnya mereka menikah kembali dengan cara dibawah tangan.
- d. Berkenaan dengan pembuatan akta kelahiran anak, jika mereka memiliki anak dari perkawinan dibawah tangan, untuk membuat akta kelahiran anak dibutuhkan pula akta nikah orang tua dari si anak tersebut.
- e. Dampak yang akan timbul jika poligami dilakukan di bawah tangan (sirri) akan merugikan pihak wanita dan anak-anak yang dilahirkan, tetapi bagi pelaku yang berpoligami secara resmi tidak akan terjadi hal-hal sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan pelaku poligami atau istri yang bersangkutan, yaitu tentang faktor (penyebab) yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga baik yang berasal dari dalam (internal) ataupun yang berasal dari luar (eksternal).

Bahwa setiap keluarga memiliki faktor yang berbeda, antara yang satu dengan yang lain dalam hal harmonis atau tidaknya rumah tangga.¹³⁵ Hal ini tergantung dengan sifat masing-masing, baik suami maupun istri. Jika faktor-faktor tersebut dikomulasikan maka akan terangkum menjadi satuan faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang berpoligami, yaitu faktor (penyebab) yang berasal dari dalam (internal) dan faktor yang berasal dari luar (eksternal).

Berkenaan dengan faktor yang berasal dari dalam (internal) yaitu sikap dan sifat seorang istri terhadap suaminya yang melakukan poligami, karena keadaan ekonomi yang menunjang terlaksananya pemenuhan semua kebutuhan, poligami yang dilaksanakan secara terbuka dan tidak ditutupi, berusaha untuk tidak pilih kasih, tidak saling mencampuri urusan pendapatan antara istri yang satu dengan yang lain dan komunikasi yang terjalin dengan baik serta hal yang paling penting adalah restu dari para istri ketika suami hendak menikah lagi.

Faktor yang berasal dari luar (eksternal) yaitu berbagai opini masyarakat sekitar yang ditujukan kepada para pelaku, baik itu opini yang baik maupun opini yang bersifat menjelekkan. Kemudian jika dilihat dari lamanya poligami yang telah dilaksanakan, rata-rata sudah berjalan cukup lama. Hal ini dapat juga dijadikan sebagai tanda

¹³⁵ Wawancara dengan Ike, isteri kedua dari Andri, tanggal 10 September 2016

harmonis atau tidaknya rumah tangga, karena jika tidak cukup harmonis tentunya akan putus ditengah jalan atau terjadi perceraian.

Dapat dipahami bahwa, faktor eksternal ini tidaklah terlalu berpengaruh karena masalah harmonis atau tidaknya rumah tangga yang berpoligami tergantung dari keluarga pelaku itu sendiri yang menjalani, bukan dari pihak luar. Justru faktor internallah yang sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang berpoligami karena merekalah yang menjalani dan merasakan kenyataan suami yang bepoligami.

Selain faktor internal dan faktor eksternal, masih ada beberapa hal lagi yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga poligami. Dalam kehidupan berumah tangga, penilaian secara umum mengenai harmonis atau tidak sebuah rumah tangga dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas konflik yang minim, mempunyai hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga, dan memiliki waktu untuk bersama keluarga sesibuk apapun.

Mengenai adanya waktu untuk bersama keluarga dalam keluarga yang poligami kemungkinan akan sulit terwujud, karena suami harus bekerja dan wajib membagi waktu dan giliran untuk istri-istri dan anak-anaknya. Waktu untuk berkumpul dengan keluarga tentunya tidak sebanyak dibandingkan suami yang hanya memiliki seorang istri. Jadi, selain faktor internal dan eksternal, masih ada beberapa faktor lain yang berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga poligami yang

berasal dari teori yang dikaitkan dengan penilaian umum mengenai keharmonisan rumah tangga.

4. Poligami dan Keharmonisan Rumah Tangga

Fenomena yang terjadi di lapangan bahwa tidak semua aspek dapat ditemui dalam satu rumah tangga, hanya ada beberapa aspek yang dapat dijadikan rujukan suatu rumah tangga harmonis atau tidak. Aspek-aspek tersebut yaitu: minimnya konflik yang terjadi, sikap saling menghargai sesama anggota keluarga, dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Mengenai waktu untuk bersama anggota keluarga, yang ada suami lebih sering berkumpul dengan istri pertama.

Terkait dengan keadaan rumah tangga yang kurang harmonis, hal tersebut dapat dilihat dari konflik yang sering terjadi setelah suami melakukan poligami. Adanya konflik tersebut menyebabkan seringnya terjadi perselisihan diantara mereka. Tidak adanya sikap saling menghargai antar anggota keluarga yang berujung pada terjadinya permusuhan sesama istri dan menyebabkan komunikasi diantara mereka kurang baik.

Di luar itu semua, pada dasarnya keharmonisan rumah tangga yang berpoligami sangat sulit dicapai karena bagaimanapun ikhlas dan adilnya seorang suami (tentunya yang bersifat lahiriyah) tidak dapat menutupi rasa cemburu dan iri dalam hati istri yang dipoligami, yang terkadang muncul dalam sikap dan perbuatan si istri, misalnya istri ngambek atau marah kepada suami dan istri muda. Apalagi jika tinggal

dalam satu rumah, hal ini tidak dapat dihindari karena apapun yang dilakukan oleh suami dan istri muda terlihat di depan mata.

Jika hal itu terjadi secara terus-menerus akan menjadi masalah yang tidak bisa dianggap enteng, kecuali dengan jalan memisahkan tempat tinggal antara istri tua dan istri muda. Setidaknya cara tersebut dapat meminimalisir rasa cemburu dan iri antara para istri.

Pada kasus poligami, ada keluarga yang rukun, damai, dan tidak terlalu bermasalah setelah suami menikah lagi, tetapi ada pula yang justru sering berselisih setelah suami berpoligami. Namun jumlah rumah tangga yang kurang harmonis masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan rumah tangga yang cukup harmonis. Setidaknya, itulah yang dapat diamati dari fenomena yang ada. Jadi, poligami bukanlah penyebab utama ketidak harmonisan rumah tangga, tetapi juga rumah tangga yang berpoligami tidak dapat dikatakan harmonis sepenuhnya sebagaimana rumah tangga monogami, hanya sebatas pada kriteria cukup harmonis.

B. Analisis Data

1. Analisis Hukum Islam tentang Poligami

Mengenai perkawinan poligami ini semua Imam Mazhab (Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristeri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh lebih dari itu. apabila seorang suami mempunyai isteri lebih dari empat, maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah

menceraikan salah seorang isteri yang empat itu dan telah habis pula masa iddahnyanya.

Hal ini didukung hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Abu Daud dari Harits bin Qais, ia berkata:“Saya masuk Islam bersama-sama isteri dengan delapan isteri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada nabi SAW. Maka beliau bersabda: pilihlah empat orang diantara mereka”

Juga hadis yang mengisyaratkan diperbolehkannya poligami diantaranya, dari Malik meriwayatkan dalam Al-Muwattha’, Nasa’iy dan Daruquthni dalam masing-masing kitab Sunnahnya, mengungkapkan:“Bahwa Nabi berkata kepada Ghailan bin Umayyah Attsaqafi yang masuk Islam, padahal ia mempunyai sepuluh orang isteri. Rasullullah bersabda kepadanya: pilihlah empat orang diantara mereka, dan ceraikan yang lainnya.Oleh karenanya poligami dibenarkan dalam hukum Islam, hanya saja persoalannya menjadi lain ketika berbicara masalah keadilan bagi suami terhadap para isteri yang di poligami, dan berbeda halnya para ulama dalam menetapkan hukum berpoligami tersebut.

Masjful Zuhdi memandang bahwa poligami lebih banyak membawa resiko atau mudarat dari pada manfaatnya; karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Oleh karenanya poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan

keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Dengan demikian poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalkan isterinya mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.

Menurut Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks QS. An-Nisa' (4): 3. Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat An-Nisa' (4): 1-3 pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan "Dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim..". Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa maskawin; maka Al-Qur'an memperbaiki perilaku yang salah tersebut. Bahwa menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks.

Pendapat Muhammad Syahrur dalam memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama: bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim, kedua: harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.

Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu perbuatan *Rukhsah*. Karena merupakan *rukhsah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak.

Dapat dipahami bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat 3 pada surat An-Nisa poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Keadilan yang dipersyaratkan pada ayat di atas adalah keadilan dalam berbagai hal yaitu: a) Adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka selain makan, minum, serta pakaian dan rumah atau tempat tinggal sebab orang hidup tidak cukup hanya makan dan minum saja tanpa tempat tinggal dan pakaian untuk menutup aurat. b) Adil dalam pembagian waktu menggilir isteri-isteri. Waktu bepergian bersama isteri juga harus mendapat keadilan, untuk itu diperlukan undian bagi suami yang mempunyai lebih dari satu isteri saat ia menghendaki bepergian.

Poligami terikat oleh syarat berlaku adil kepada seluruh isteri, dan barang siapa yang tidak bisa memastikan kesanggupannya untuk merealisasikan prinsip keadilan kepada seluruh isteri-isterinya, maka dia tidak boleh beristeri lebih dari satu; Seandainya dia tetap menikah lebih dari satu sementara dia tahu bahwa dia tidak dapat berlaku adil, maka nikahnya sah tapi dia berdosa.

2. Latar Belakang Suami Berpoligami

Berpijak dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tanjungkarang, dapat diketahui, bahwa hanya 1 perkara dari 585 perkara yang diputus pada tahun 2015, tentang pengajuan izin berpoligami. Dengan demikian berapa banyak poligami di Bandar Lampung, termasuk di kelurahan Rajabasa, yang melakukan poligami dan tidak tercatat/terdaftar di Pengadilan Agama Tanjungkarang. Bahkan menurut Kepala KUA Rajabasa Bandar Lampung, tidak ditemukan bagi pelaku poligami yang tidak tercatat di KUA, untuk melaksanakan perkawinan di depan petugas pencatat perkawinan (KUA), kecuali yang memiliki izin resmi dari Pengadilan Agama.

Hasil penelitian yang telah diperoleh dilapangan, jumlah kasus poligami yang menjadi sumber primer dan telah berhasil diwawancarai dalam penelitian ini yaitu 2 kasus. Maka akan diungkap analisis yang melatarbelakangi mereka sehingga mereka

meilih untuk berpoligami, semenatara isteri dan anak telah mereka miliki semua.

Fenomena yang terjadi di Kelurahan Rajabasa rata-rata pernikahan pelaku poligami dilakukan secara sirri atau dibawah tangan, artinya poligami tersebut dilaksanakan tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama sebagai lembaga resmi yang menangani masalah perkawinan bagi yang beragama Islam.

Adapun alasan yang melatar belakangi suami berpoligami di kelurahan Rajabasa, adalah: karena keinginan dari diri pelaku dan didorong rasa cinta terhadap seseorang, karena faktor ekonomi, mereka merasa mampu memenuhi kebutuhan jika beristri lebih dari seorang, dan karena perselingkuhan. Meskipun pada lahiriyahnya ekonomi suami yang hanya honorer untuk menghidupi isteri pertama dan 2 orang anak, ditambah 1 (satu) orang anak bawaan dari isteri kedua, ditambah lagi 2 (dua) orang anak dari perkawinan dengan isteri ke 2. Dilihat dari alasan-alasan tersebut, rata-rata mereka memiliki alasan yang tidak sesuai dengan alasan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kecuali alasan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adanya alasan tersebut di atas, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan izin poligami. Sebenarnya alasan dan syarat yang terdapat dalam prosedur poligami merupakan jalan untuk tidak memudahkan poligami meskipun poligami diperbolehkan jika benar-benar dalam keadaan darurat sehingga perlu ditentukan

alasan sedemikian rupa agar tidak ada pihak yang dirugikan. Lagi pula Undang-undang Perkawinan pada dasarnya menganut azas monogami, seorang suami untuk seorang istri. Dengan adanya alasan dan syarat tersebut yang terdapat dalam undang-undang saling mendukung untuk mempertahankan azas monogami. Jadi, bagi mereka yang benar-benar ingin berpoligami, pilihannya adalah menikah dibawah tangan daripada harus meminta izin kepada Pengadilan Agama, sebagaimana yang dilakukan oleh bapak Andri dan Jono.

Terciptanya suatu kondisi ditengah masyarakat tidak terlepas dari berbagai faktor yang mmempengaruhi baik faktor lingkungan, sosial, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Semua faktor tersebut saling mempengaruhi sikap dan tingkah laku manusia yang berlaku di lingkungannya, termasuk dengan adanya poligami, terlebih yang apabila poligami tersebut dilakukan dibawah tangan, banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya adalah faktor keinginan atau nafsu syahwat sebagai pendorongnya dan yang kedua adalah faktor ekonomi.

Faktor pertama, nafsu merupakan pendorong yang sangat kuat terjadinya kasus poligami, karena nafsu memang kebutuhan biologis yang diciptakan oleh Allah bagi setiap makhluknya. Belum lagi bagi mereka yang memiliki kelainan seks seperti hiperseks, maka tidaklah cukup hanya dengan satu isteri saja.

Faktor kedua, terjadinya kasus poligami yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi sebagai alat penunjang kehidupan rumah tangga merupakan kebutuhan primer yang harus dipertahankan kestabilannya yaitu, stabilnya kondisi ekonomi yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Apalagi bagi keluarga yang berpoligami, ekonomi sangat mendukung harmonis atau tidaknya kehidupan keluarga karena suami tidak hanya menghidupi satu isteri dan tentunya harus pula menghidupi anak-anak dari isteri-isteri tersebut. Namun bukan berarti dorongan nafsu dan ekonomi saja sebagai faktor terjadinya poligami, tetapi faktor lainpun tidak menutup kemungkinan manjadi sebab terjadinya poligami.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan pelaku poligami atau istri yang bersangkutan, yaitu tentang faktor (penyebab) yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga baik yang berasal dari dalam (internal) ataupun yang berasal dari luar (eksternal).

Berkenaan dengan faktor yang berasal dari dalam (internal) yaitu sikap dan sifat seorang istri terhadap suaminya yang melakukan poligami, karena keadaan ekonomi yang menunjang terlaksananya pemenuhan semua kebutuhan, poligami yang dilaksanakan secara terbuka dan tidak ditutupi, berusaha untuk tidak pilih kasih, tidak saling mencampuri urusan pendapatan antara istri yang satu dengan yang lain dan komunikasi yang

terjalin dengan baik serta hal yang paling penting adalah restu dari para istri ketika suami hendak menikah lagi.

Faktor yang berasal dari luar (eksternal) yaitu berbagai opini masyarakat sekitar yang ditujukan kepada para pelaku, baik itu opini yang baik maupun opini yang bersifat menjelekkan. Kemudian jika dilihat dari lamanya poligami yang telah dilaksanakan, rata-rata sudah berjalan cukup lama. Hal ini dapat juga dijadikan sebagai tanda harmonis atau tidaknya rumah tangga, karena jika tidak cukup harmonis tentunya akan putus ditengah jalan atau terjadi perceraian.

Dapat dipahami bahwa, faktor eksternal ini tidaklah terlalu berpengaruh karena masalah harmonis atau tidaknya rumah tangga yang berpoligami tergantung dari keluarga pelaku itu sendiri yang menjalani, bukan dari pihak luar. Justru faktor internallah yang sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang berpoligami karena merekalah yang menjalani dan merasakan kenyataan suami yang bepoligami.

Mengenai adanya waktu untuk bersama keluarga dalam keluarga yang poligami kemungkinan akan sulit terwujud, karena suami harus bekerja dan wajib membagi waktu dan giliran untuk istri-istri dan anak-anaknya. Waktu untuk berkumpul dengan keluarga tentunya tidak sebanyak dibandingkan suami yang hanya memiliki seorang istri. Jadi, selain faktor internal dan eksternal, masih ada beberapa faktor lain yang berpengaruh terhadap

keharmonisan rumah tangga poligami yang berasal dari teori yang dikaitkan dengan penilaian umum mengenai keharmonisan rumah tangga.

Bapak (Andri) berpoligami selama lebih kurang 7 tahun dan memiliki 2 (dua) orang isteri. Keinginan tersebut lebih kepada berkesempatan menurutkan nafsu semata. Sedangkan bagi si wanita (bernama Ike) mau-mau saja selama kebutuhan mereka dapat dipenuhi untuk menghidupi 1 orang anak bawaannya, meskipun hanya bertempat tinggal berpindah-pindah dari kost yang satu ketempat kost yang lain. Bapak Andri menempuh jalan sembunyi-sembunyi tanpa ada persetujuan dari isteri pertamanya, hal tersebut tidak menjadi penghalang dilaksanakannya pernikahan bagi bapak andri.

Menurut pengakuan dari isteri kedua (Ike), dalam 3 tahun terakhir ini, Bapak Andri jarang memberi nafkah lahir, meskipun memberi hanya terkadang saja, dan itupun jauh dari berkecukupan, akibatnya isteri kedua banting tulang mencari pekerjaan asisten rumah tangga di tiga tempat untuk menopang kehidupan 3 orang anak dalam asuhannya.

Bapak Harjono (Jono) berpoligami selama lebih kurang enam tahun dan memiliki dua orang isteri. Isteri pertama dinikahi secara sah menurut agama dan Negara, sedangkan isteri kedua dinikahi secara sirri. Pernikahan kedua bapak Jono ini tidak diketahui oleh isteri pertama. Ketika pernikahan sudah

dilaksanakan, barulah beliau berterus terang bahwa dirinya telah menikah lagi. Tentu saja istri bapak Jono ini terkejut dan merasa tidak terima bahwa suaminya telah menikah lagi. Belum lagi anak sulungnya yang sudah dewasa. Si sulung juga tidak terima bapaknya memiliki istri dua. Hal ini berlangsung hingga menyebabkan antara istri tua dan istri muda kurang baik.

Alasan suami (Jono) melakukan poligami karena mereka menginginkannya atau dengan istilah lain dikarenakan dorongan nafsu syahwat semata (terngiang dengan isteri kedua sebagai mantan pacarnya). Lebih lanjut menurut Jono, mengatakan bahwa alasan beliau melakukan poligami karena perempuannya yang ingin dinikahi, dan terdorong ekonomi yang dimiliki, padahal dahulunya tidak memiliki niat untuk menikah lagi. Tetapi, setelah ekonomi mulai membaik, saat itulah jono ingin menikah lagi.

3. Antara Poligami dan Keharminsan Rumah Tangga

Realita yang ada di tengah masyarakat Kelurahan Rajabasa rata-rata pernikahan pelaku poligami dilakukan secara sirri atau dibawah tangan, artinya poligami tersebut dilaksanakan tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama sebagai lembaga resmi yang menangani masalah perkawinan bagi yang beragama Islam. Padahal jika mereka meminta izin kepada Pengadilan Agama sebelum dilaksanakannya poligami, akan sulit untuk mendapatkan izin tersebut jika alasan dan syarat yang ditentukan tidak terpenuhi. Adapun alasan yang mereka kemukakan yaitu: keinginan dari diri

pelaku dan didorong rasa cinta terhadap seseorang, karena faktor ekonomi, mereka merasa mampu memenuhi kebutuhan jika beristri lebih dari seorang, karena istri tidak dapat memberikan keturunan, dan karena perselingkuhan. Dilihat dari alasan-alasan tersebut, rata-rata mereka memiliki alasan yang tidak sesuai dengan alasan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kecuali alasan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan dan syarat yang terdapat dalam prosedur poligami merupakan jalan untuk tidak memudahkan poligami meskipun poligami diperbolehkan jika benar-benar dalam keadaan darurat sehingga perlu ditentukan alasan sedemikian rupa agar tidak ada pihak yang dirugikan. Lagi pula Undang-undang Perkawinan pada dasarnya menganut azas monogami, seorang suami untuk seorang istri. Dengan adanya alasan dan syarat tersebut yang terdapat dalam undang-undang saling mendukung untuk mempertahankan azas monogami. Jadi, bagi mereka yang benar-benar ingin berpoligami, pilihannya adalah menikah dibawah tangan daripada harus meminta izin kepada Pengadilan Agama.

Setiap perbuatan akan menimbulkan suatu dampak, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak yang timbul dari kasus poligami bila dikaitkan dengan keharmonisan rumah tangga, adalah:

- a. Kasus pernikahan di bawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama),

dianggap tidak sah menurut Negara walaupun sah menurut agama. Meskipun perkawinan dibawah tangan bukan hanya dari para pelaku poligami, tetapi setidaknya akan menambah jumlah kasus perkawinan di bawah tangan.

- b. Konsekuensi dari perkawinan dibawah tangan, akan memunculkan kasus perceraian dibawah tangan pula. Karena, jika rumah tangga sering terjadi konflik dan tidak ada lagi jalan keluarnya, maka alternatif terakhir adalah perceraian. Untuk bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, mereka tidak memiliki buku (akta) nikah, sedangkan untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan harus menyertakan buku (akta) nikah sebagai bukti bahwa mereka dahulu menikah secara resmi.
- c. Akibat dari perceraian di bawah tangan tersebut tidak bisa menikah lagi secara resmi menurut ketentuan pemerintah karena dari perceraian yang mereka lakukan tidak ada surat bukti bahwa mereka sudah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, sehingga pada akhirnya mereka menikah kembali dengan cara dibawah tangan.
- d. Berkenaan dengan pembuatan akta kelahiran anak, jika mereka memiliki anak dari perkawinan dibawah tangan, untuk membuat akta kelahiran anak dibutuhkan pula akta nikah orang tua dari si anak tersebut.
- e. Dampak yang akan timbul jika poligami dilakukan di bawah tangan (sirri) akan merugikan pihak wanita dan anak-anak yang dilahirkan,

tetapi bagi pelaku yang berpoligami secara resmi tidak akan terjadi hal-hal sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan pelaku poligami/istri di kielurahan rajabasa, yaitu tentang faktor (penyebab) yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga baik yang berasal dari dalam (internal) ataupun yang berasal dari luar (eksternal).

Setiap keluarga memiliki faktor yang berbeda, antara yang satu dengan yang lain dalam hal harmonis atau tidaknya rumah tangga. Hal ini tergantung dengan sifat masing-masing, baik suami maupun istri. Jika faktor-faktor tersebut diakumulasikan, maka akan terangkum menjadi satuan faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang berpoligami, yaitu faktor (penyebab) yang berasal dari dalam (internal) dan faktor yang berasal dari luar (eksternal).

Faktor yang berasal dari dalam (internal) yaitu sikap dan sifat seorang istri terhadap suaminya yang melakukan poligami, karena keadaan ekonomi yang menunjang terlaksananya pemenuhan semua kebutuhan, poligami yang dilaksanakan secara terbuka dan tidak ditutupi, berusaha untuk tidak pilih kasih, tidak saling mencampuri urusan pendapatan antara istri yang satu dengan yang lain dan komunikasi yang terjalin dengan baik serta hal yang paling penting adalah restu dari para istri ketika suami hendak menikah lagi.

Faktor yang berasal dari luar (eksternal) yaitu berbagai opini masyarakat sekitar yang ditujukan kepada para pelaku, baik itu opini yang baik maupun opini yang bersifat menjelekkan. Kemudian jika

dilihat dari lamanya poligami yang telah dilaksanakan, rata-rata sudah berjalan cukup lama. Hal ini dapat juga dijadikan sebagai tanda harmonis atau tidaknya rumah tangga, karena jika tidak cukup harmonis tentunya akan putus ditengah jalan atau terjadi perceraian.

Dapat dipahami bahwa, faktor eksternal ini tidaklah terlalu berpengaruh karena masalah harmonis atau tidaknya rumah tangga yang berpoligami tergantung dari keluarga pelaku itu sendiri yang menjalani, bukan dari pihak luar. Justru faktor internallah yang sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang berpoligami karena merekalah yang menjalani dan merasakan kenyataan suami yang bepoligami.

Selain faktor internal dan faktor eksternal, masih ada beberapa hal lagi yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga poligami. Penilaian secara umum mengenai harmonis atau tidak sebuah rumah tangga dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas konflik yang minim, mempunyai hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga, dan memiliki waktu untuk bersama keluarga sesibuk apapun.

Mengenai adanya waktu untuk bersama keluarga dalam keluarga yang poligami kemungkinan akan sulit terwujud, karena suami harus bekerja dan wajib membagi waktu dan giliran untuk istri-istri dan anak-anaknya. Waktu untuk berkumpul dengan keluarga tentunya tidak sebanyak dibandingkan suami yang hanya memiliki seorang istri. Jadi, selain faktor internal dan eksternal, masih ada beberapa faktor lain yang berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga poligami yang

berasal dari teori yang dikaitkan dengan penilaian umum mengenai keharmonisan rumah tangga.

Fenomena yang terjadi di lapangan bahwa tidak semua aspek dapat ditemui dalam satu rumah tangga, hanya ada beberapa aspek yang dapat dijadikan rujukan suatu rumah tangga harmonis atau tidak. Aspek-aspek tersebut yaitu: minimnya konflik yang terjadi, sikap saling menghargai sesama anggota keluarga, dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Mengenai waktu untuk bersama anggota keluarga, yang ada suami lebih sering berkumpul dengan istri pertama.

Terkait dengan keadaan rumah tangga yang kurang harmonis, hal tersebut dapat dilihat dari konflik yang sering terjadi setelah suami melakukan poligami. Adanya konflik tersebut menyebabkan seringnya terjadi perselisihan diantara mereka. Tidak adanya sikap saling menghargai antar anggota keluarga yang berujung pada terjadinya permusuhan sesama istri dan menyebabkan komunikasi diantara mereka kurang baik.

Dapat dipahami bahwa, pada dasarnya keharmonisan rumah tangga yang berpoligami sangat sulit dicapai karena bagaimanapun ikhlas dan adilnya seorang suami (tentunya yang bersifat lahiriyah) tidak dapat menutupi rasa cemburu dan iri dalam hati istri yang dipoligami, yang terkadang muncul dalam sikap dan perbuatan si istri, misalnya istri ngambek atau marah kepada suami dan istri muda. Apalagi jika tinggal dalam satu rumah, hal ini tidak dapat dihindari karena apapun yang dilakukan oleh suami dan istri muda terlihat di

depan mata. Jika hal itu terjadi secara terus-menerus akan menjadi masalah yang tidak bisa dianggap enteng, kecuali dengan jalan memisahkan tempat tinggal antara istri tua dan istri muda. Setidaknya cara tersebut dapat meminimalisir rasa cemburu dan iri antara para istri.

Pada kasus poligami, ada keluarga yang rukun, damai, dan tidak terlalu bermasalah setelah suami menikah lagi, tetapi ada pula yang justru sering berselisih setelah suami berpoligami. Namun jumlah rumah tangga yang kurang harmonis masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan rumah tangga yang cukup harmonis. Setidaknya, itulah yang dapat diamati dari fenomena yang ada. Jadi, poligami bukanlah penyebab utama ketidak harmonisan rumah tangga, tetapi juga rumah tangga yang berpoligami tidak dapat dikatakan harmonis sepenuhnya sebagaimana rumah tangga monogami, hanya sebatas pada kriteria cukup harmonis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari pembahasan, penyajian data dan analisis hasil penelitian, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan yang melatar belakangi suami melakukan poligami yaitu: keinginan pelaku dan berdasarkan rasa cinta terhadap seseorang; alasan ekonomi, mereka merasa mampu untuk menghidupi lebih dari seorang istri; hubungan gelap sang suami dengan wanita lain yang diawali dari bersenang-senang untuk melakukan hubungan badan dengan wanita lain, lalu tumbuh rasa sayang yang mendalam, sehingga bersedia untuk menikahnya (poligami) dengan cara sirri atau tidak tercatat di KUA setempat..
2. Faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dalam pasangan poligami di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung yaitu: pertama, faktor yang berasal dari dalam (internal) yaitu yang berasal dari dalam rumah tangga (keluarga) itu sendiri. Kedua, faktor yang berasal dari luar (eksternal) yaitu bisa berasal dari keluarga ataupun masyarakat sekitar. Dan poligami bukanlah penyebab utama ketidak harmonisan rumah tangga, tetapi juga rumah tangga yang berpoligami tidak dapat dikatakan harmonis sebagaimana harmonisnya rumah tangga monogami, hanya sebatas cukup harmonis.

B. Saran-Saran

1. Bagi pelaku poligami maupun yang ingin berpoligami, diharapkan ada keterbukaan untuk mendapat izin dari isteri pertama, dan akan

lebih baik lagi bila poligami dilakukan dengan izin dari pengadilan, karena apabila poligami dilakukan tanpa izin dari pengadilan atau dengan istilah lain poligami dibawah tangan, akan menimbulkan kerugian bagi pihak wanita (istri muda) dan anak-anak yang dilahirkan. Tentunya akan sangat memprihatinkan.

2. Bagi pihak yang berwenang dalam mengatasi masalah perkawinan khususnya mengenai poligami, sebaiknya dilakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara intensif agar memperkecil terjadinya kasus poligami tanpa izin pengadilan atau poligami dibawah tangan.

Akhirnya, diharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun bagi penyempurnaan tulisan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Āmin..

C. Penutup

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian ini tanpa halangan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia pada agama yang mengajarkan umatnya untuk selalu meneliti, berfikir dan berikhtiar agar selalu berjaya di muka bumi ini.

Karena keterbatasan kemampuan berfikir dan kedangkalan ilmu pengetahuan, maka masih banyak kekurangan dari berbaagai segi, oleh

karena itu maka senantiasa diharapkan saran dan kritik dari pembaca, sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan agar mencapai kesempurnaan. Atas saran dan kritik dari pembaca sekalian, diucapkan terimakasih. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan Maghfiroh-Nya kepada kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman bin Ahmad al-Iji, *Syarah al-'Adhl ala Mukhtashar al-Muntaha*, Juz 2, ttp. al-Amiriyah, tt, h. 239
- Abdul Aziz bin Abd as-Salam, Muhammad 'Iz ad-Din, *Qawa'id al-Ahkam fie Maşalih al-Anam*, Juz 1, t.t.p.,: al-Istiqomah, t.t.,
- Abduttawab, Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta),
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958),

- Al- Syatiby, *al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.),
- , *Fathi al-Daraini, al-manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihadi bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadist, 1975),
- al-Afriqi, Ibnu Mandzur, (Bairut: Dâr al-Sadr, t.th), VIII,
- Al-Akkad, Abbas Mahmud, *Wanita dalam Al-Qur'an*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976,
- al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),
- Al-Hamdani, H.S.A., penerj. H. Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002,
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al- 'Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyyah, 1969),
- Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Jilid Pertama (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1382/1963),
- Al-Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1985),
- Al-Syatibi, *al-Muwaafaqât fie Uşûl al-Syari'ah*. (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), jilid 2,

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
- Anwar, Ahmad, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Sumbangsih, Yogyakarta, 1974,
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005),
- , *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),
- As-Suyuti, Imam Jalaludin Abdurrahman Abi Bakar, *Al Misbah Wa An-Nazair*, (Beirut: Dar Al Fakir, 1995 M./1415H.),
- Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terjemaha Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, (Yogyakarta: LSPPA dan CUSO, 1994),
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967,
- Asy Syaarif, Muhammad, *Poligami itu Wajib?*, (Yogyakarta: Mumtaz, 2012),
- Bruggink, J.J.H. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa oleh B. Arief Sidharta. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000,
- Dachlan, NJ. Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jamunu, Jakarta, 1969),
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi di Islam*, (Jakarta:PT. Baru Van Hoeve,t.t, 2006),

- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1999,
- , Dirjen Bimas Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (PT. Tehazed, Jakarta,, 2010),
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008),
- Djamil, Fathurrahman, *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya Terhadap Anak dan Harta*, Jakarta, GT2 dan GG Pas, Mei 2007.
- Firdaweri dkk., *Perceraian Akibat Tidak Ada Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjungkarang)*, Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2010
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2008),
- Gootshalk, Louis, *Understanding History a Primer of Historical Method*, Penerjemah Nograho Noto Susanto, (Jakarta: UI Press, 1985),
- Gregory J. Feist, Jess; (2010). *Teori Kepribadian: Theories of Personality. Salemba Humanika*.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1994,
- , *Metodologi Research II*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990,
- Hamid Alim, Yusuf, *Al Maqâsid al 'Ammah Lie as-Syariah al-Islamiyah*, (Riyadh: Ma'had Ali Al Fikri Al Islami, Cet-2, 1994 M/1415 H) ,

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002,

Hawari, Dadang, *Majalah Warta Bumi Putra*, (Edisi 24, Juli 1994),

[http://b.domaindlx.com/./data informasi.htm](http://b.domaindlx.com/./data%20informasi.htm), diakses 20 Oktober 2014

[http://yotnoali.blogspot.com/2011/07/Menimbang -Manfaat-Mudharat - Poligami.html](http://yotnoali.blogspot.com/2011/07/Menimbang-Manfaat-Mudharat-Poligami.html).? m=1,9/6/2014, 10:38 WIB

[http:// keluarga.com/ authors /**Intan Lolitasari**](http://keluarga.com/authors/IntanLolitasari), dikutip dari majalah Wanita berbahasa Inggris, Akses 10 juni 2016

<http://teori-psikologi.blogspot/2008/05/keharmonisan-rumah-tangga.html>, diakses pada sabtu, 30 Juli 2011 ;

[http://2. Blogspot.com, **Novita BossFamily**](http://2.Blogspot.com/NovitaBossFamily) On: Senin, Keluarga Harmonis, Akses 05 Mei 2016

Husin Al-Munawar, Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet.2, Penamadani, Jakarta, 2005,

Ibn Abd al-Salam, Izzuddin, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Bairut: Dar al-Jail, t.t), jilid II,

Ibn Qayyim, *I'lam al-Muaqi'in Rabb al- 'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl, t.t.), Jilid III.

Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, (Kairo: Darul Ma'arif),

Ilyas, Alinis, *Metodelogi Penelitian*, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung, 2003,

Irawan, Prasetya, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Cet.I, STIA-LAN Press, Jakarta, 1999.

- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, Gaung Persada Press, 2008,
- James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management*, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998).
- Jiko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori & Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011,
- Kamaluddin Imam, Muhammad, *Uşulul Fiqh Al-Islamy*, (Iskandariyah: Darul Matnu'at Al Jami'ah,
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Islamic Legal Philosophiy*, (Islamabad; Islamic Research Institute, 1977),.
- Khan, M. Fahim, *Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory*, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed), *Reading in Islamics Economic Thought*.
- Labib Ustadz, MZ ,*Rahasia Poligami Rasulullah SAW*, (Jakarta: Darul Falah, 2005)
- Lexi. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kuantatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002),
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Muhammad bin Yazid Al-Qazwainy, Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1995),

- Muhammad Jawad Mughiniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerjemah Masykur AB, Lentera 1996,)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
- Mukri, Moh., *Benarkah Imam Syafi'i Menolak Masalah?*, Yogyakarta: Pesantren Nawaesea Press, 2010,
- Musdah Mulia, Siti, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004),
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2009),
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,
- Prasetyo, Bambang, dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
- Qorib, Ahmad, *Uşul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet. II
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994).
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012),
- Romdhon Al Buthi, Muhammad Said, *Dawābitu al Maslahah fie al-Syariah al-Islamiyah*, (Muassasah Risalah),
- Sabiq, Sayid, *Fiqih As- Sunnah*, Penerjemah Syaiful Islam, (Bandung: Al-Maarif, 1999),
- Salam, Lubis, *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah*, (Terbit Terang, Surabaya, 1998

- Saleh, K. Kwantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indah, 1980),
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009,
- Sedarmayanti dan Syarif Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung, 2002
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998,
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005),
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008),
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),
- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*,
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, CV. Rajawali, Jakarta, 1991,
- Suryadilaga, M. Alfatih, *Sejarah Poligami dalam Islam cet.1*,(Bandung: Citra Umbara, 2002),
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terjemah Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: Elsaq, 2004),
- Syarifuddin, Amir, *Uşul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2011,
- Tahido Yanggo, Huzaemah, *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*, Jakarta GT2 dan GG Pas,
- Tihami, Sobari Sahrani , *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Umbara, 2012),

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

Wirawan Sarwono, Sarlito, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982),

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996),

Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, .

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Cet. Ke-10*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997,

JADWAL PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN

Penelitian ini direncanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan atau (90 hari) dengan rincian sbb:

No	Uraian Kegiatan Penelitian	Waktu/ Tgl/ Bl
1	Tahap persiapan/ Tahap awal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi perumusan Judul 2. Mengumpulkan bahan Penelitian 3. Pembuatan proposal 4. Menyerahkan proposal/ Seminar proposal 5. Konsultasi dengan Pembimbing 6. Revisi Provosal/ penyusunan 	0,5 bulan (15 hari)
2	Tahap Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan bahan rujukan 2. Pembuatan daftar dokumen dan instrument pengumpulan data 3. Pengumpulan data dari berbagai sumber 4. Mengadakan diskusi pada para ahli hukum Islam dan para pihak terkait 	1 bulan (30 hari)
3	Evaluasi Laporan <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengklasifikasi dan menganalisa data yang telah dihimpun 2. Mendiskusikan hasil penelitian 3. Menulis (mengolah data)/ dan 	1 bulan (30 hari)

	<p>menyusun laporan</p> <p>4. Konsultasi dengan Pembimbing</p> <p>5. Menggandakan dan menyerahkan laporan hasil penelitian</p> <p>6. Seminar hasil penelitian</p> <p>7. Revisi hasil penelitian</p> <p>8. Konsultasi dengan pembimbing</p>	
4	<p>Laporan jadi hasil Penelitian:</p> <p>1. Mengecek data yang belum lengkap</p> <p>2. Membuat draf laporan penelitian</p> <p>3. Mencetak dan menggandakan hasil penelitian</p> <p>4. Menyerahkan/ Pengiriman hasil Penelitian</p>	0,5 bulan (15 hari)



BIODATA PENULIS

H. Khoirul Abror, lahir di Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak, Tanggamus, Lampung, Tanggal 03 April 1957 yang sekarang berdomisili di Bandar Lampung. **E-mail:** khoirulabror472@yahoo.com; **HP. 08127265269.**

Setelah menamatkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Putihdoh Tahun 1970, pendidikan dilanjutkan pada Pondok Pesantren YMPI (Yayasan Majelis Pelajar Islam) dan memperoleh ijazah pondok (swasta); setelah terhenti selama 3 tahun, pada tahun 1976 memperoleh ijazah Tsanawiyah Negeri melalui ujian persamaan. Kemudian melanjutkan ke Madrasah ‘Aliyah Negeri (Ex. SP.IAIN) memperoleh ijazah Negeri Tahun 1979.

Pada tahun 1979 itu juga menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung Jurusan Pradilan Agama, memperoleh ijazah Sarjana Muda (BA). Tahun 1983, melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi yang sama di IAIN Raden Intan Lampung, dan memperoleh ijazah Doktorandus (Drs) Tahun 1986; Menyelesaikan program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung (UNILA) tahun 2003. Saat ini sedang menempuh program Doktor Prodi Hukum Keluarga.

Aktivitas dibidang pendidikan dimulai sebagai Asisten Dosen Luar Biasa pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung sejak Tahun 1984-1987; Pada tahun 1987 diterima sebagai Calon PNS, dan pada tahun 1988 diangkat sebagai Dosen tetap pada Perguruan Tinggi yang sama dalam mata kuliah Fiqh Ibadah sampai sekarang dengan pangkat Pembina Utama Muda/Lektor Kepala (IV/c).

Karya ilmiah yang telah dikerjakan antara lain: Sebab-sebab Hapusnya Hukuman menurut KUHP dan Hukum Islam (Skripsi Sarjana Muda), Recidive Pencurian Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Skripsi Sarjana). Perkawinan antar Agama (Penelitian Kolektif); Klinik Tradisional dalam Upaya Menghimpun Tenaga kerja Wanita, Studi Kasus pada Panti Pijat di Sepanjang Jalan Yos Sudarso Kecamatan Teluk Betung Selatan (Penelitian Individu) yang diterbitkan oleh seksi penerbitan Fakultas Syari'ah. Problematika Pengurusan Janazah Tanpa Identitas, Studi di RSUD Dr. H. Abdoel Moeloek (Penelitian Individu) tahun 2002 dengan ISBN: 979-3161-01-9; dan juga Buku Fiqh Ibadah (Edisi Revisi) tahun 2015, dengan ISBN 979-3161-00-0. Antisipasi dan Solusi kekerasan Massa, studi di wilayah Hukum Poltabes Bandar Lampung (Penelitian Individu Tahun 2003 ISBN No. 979-3161-42-6. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung-karang) Penelitian individu (Tesis S2) tahun 2003. Buku Dakwah Pembangunan ISBN No. 979-3161-40-3. Dan buku ajar Fiqh Munakahat, yang diterbitkan oleh seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, tahun 2009. Terobosan bagi Pondok Pesantren dalam upaya Pengelolaan BMT dan Balai Usaha Latihan Keterampilan, makalah ilmiah yang dipresentasikan pada Workshop yang diselenggarakan Kanwil Kemenag

Provinsi Lampung di Hotel Kurnia 2; Jenazah Anonim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perawatan Jenazah di RSUD Abdoel Moeloek), Penelitian individu (Tahun 2014), ISBN 978-602-717-081-0; “Hukum Keluarga Islam di Afganistan (Menyingkap Pencatatan Perkawinan di Afganistan dan Negara Islam” (ISBN: 978-602-9326-56-7); Hasil Penelitian atau Pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk Monograf, dalam Buku (Editor): SK. No. In.09/LP2M/ TL.01/ Buku.03.a/ 2013 Tanggal: 15 April 2013; “Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Negara-negara Muslim”, (Hasil Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional Terakreditasi, Kep Dirjen Dikti Kemendiknas RI No.040/ 2014, Al-‘Adalah, Vol XII, Hal 235-464, Desember 2014, ISSN: 0854-1272; Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Perceraian (Tahun 2015) yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, ISBN 979-602-10-6783-3; Perkawinan Khunsa (Kelamin Ganda) dalam perspektif Hukum Islam, Penelitian ini Dibiayai dari Dana DIPA IAIN Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2015; Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat, Dampak dan Solusinya di Provinsi Lampung, (sedang dalam proses Penelitian Disertasi Program Doktor).

Juga sering membuat artikel di Media Cetak; Koran dan majalah ilmiah lain yang telah terakreditasi.



Laporan Hasil Penelitian Individu